PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
PURBALINGGA
Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga Telepon (0281) 891016,
896645 Fax. 893279

LAPORAN KEUANGAN
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA
TAHUN 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

DAFTAR ISI

			Hal
Bab I	Pendahuluan		4
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
	1.3	Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	7
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD		10
	2.1	Umum	10
	2.2	Struktur Ekonomi	11
	2.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	11
	2.4	Kebijakan Keuangan	11
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan		13
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	13
	3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	14
Bab IV	Kebijakan Akuntansi		15
	4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan		30
	5.1	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
		5.1.1 Penjelasan Umum atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
		5.1.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31

	5.2	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	48
	5.3	Neraca	50
		5.3.1 Posisi Keuangan Secara Umum	50
		5.3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca	51
	5.4	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	70
		5.4.1 Penjelasan Umum atas Pos-Pos Laporan Operasional	70
		5.4.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	71
	5.5	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	78
		5.5.1 Penjelasan Umum atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	78
		5.5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	79
	5.6	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	83
Bab VI	Penutup		86

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2016, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2016 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 maka ada 7 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

   Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga disusun berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

q. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual.

r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan

pencapaian target kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat penjelaskan entitas akunansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:

1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju

Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*) ke Basis Akrual (*Accrual Basis*) pada Laporan Keuangan Tahun 2018.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Realisasi Anggaran
   a. Pendapatan – LRA
   b. Belanja
4. Neraca
   a. Aset
   b. Kewajiban
   c. Ekuitas
5. Laporan Operasional
   a. Pendapatan – LO
   b. Beban
6. Laporan Arus Kas
7. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Umum

Secara umum, Kondisi perekonomian Purbalingga menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga (adh) Konstan, maupun PDRB Per Kapita.

PDRB perkapita Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Purbalingga rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat dikisaran 5,7%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,11 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara kuantitas tetapi juga terjadi secara kualitas, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga

Tahun 2011-2015

PDRB / Kapita	**Atas Dasar Harga Berlaku**		**Atas Dasar Harga Konstan**	
	Pertahun	**Perbulan**	**Pertahun**	**Perbulan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2011	14,182,449.02	1,181,870.75	13,332,877.71	1,111,073.14
2012	15,453,320.80	1,287,776.73	13,947,811.20	1,162,317.60
2013	16,810,582.97	1,400,881.91	14,522,788.60	1,210,232.38
2014	18,843,658.82	1,570,304.90	15,212,239.82	1,267,686.65
2015	20,663,951.83	1,721,995.99	15,867,613.16	1,322,301.10

Sumber: purbalinggakab.bps.go.id

2.2. Struktur Ekonomi

Sampai dengan tahun tahun 2005, struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Sektor perkebunan diwakili oleh perkebunan kelapa yang menghasilkan gula merah (gula kelapa) sedangkan sektor industri diwakili oleh industri kerajinan rambut palsu dan bulu mata, selain itu juga ada industri pengolahan kayu yang cukup banyak.

Tapi sejak tahun 2005, sektor pariwisata mulai berkembang seiring dengan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat rekreasi baru di Purbalingga seperti Obyek Wisata Air Bojongsari (*Owabong*), Sanggar Luri Ilmu Park (*Sanggaluri Park*), dan Purbasari Pancuran Mas. Demikian juga dengan sektor industri, pertumbuhan industri kerajinan rambut palsu semakin banyak dan tersebar hampir di seluruh area wilayah Kabupaten Purbalingga.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mengalami *trend* yang semakin baik, sebagaimana terlihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan.

2.4. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan APBD-P TA 2019 tidak bisa dilepaskan dari perubahan asumsi ekonomi makro APBD-P TA 2019 maupun perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD-P TA 2019. Oleh karena itu, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga TA 2019 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;

2) Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;

3) Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil maupun dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

B. Kebijakan Beban Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam APBD-P TA 2019 diarahkan pada:

1) Pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD untuk belanja operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas.

2) Peningkatan stimulus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3) Pelaksanaan keberpihakan (*affirmativeaction*), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan industri kecil dan industri kreatif.

4) Merencanakan ulang kegiatan-kegiatan besar yang telah dianggarkan dengan memperhatikan ketercukupan waktu penyelesaian maupun sumber daya yang tersedia.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum, pengelolaan keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2019, yaitu realisasi pendapatan sebesar **Rp.104.161.541.717,00** atau mencapai **112,00%** dan realisasi belanja sebesar **Rp.145.588.686.309,00** atau mencapai **88,56%**

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

1. Realisasi Pendapatan dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.104.161.541.717,00 atau 112,00 % dari target sebesar Rp.93.000.000.000,00 sehingga terdapat surplus pendapatan sebesar Rp.11.161.541.717,00.
2. Realisasi Belanja dari dana APBD Rp.48.042.749.516,00 atau 68,27% dari anggaran sebesar Rp.70.373.625.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran APBD sebesar Rp.22.330.875.484,00
3. Realisasi Belanja BLUD sebesar Rp.97.545.936.793,00 atau 103,74 % dari anggaran sebesar Rp.94.025.748.000,00 sehingga terdapat defisit anggaran BLUD sebesar Rp.3.520.188.793,00.
4. Surplus Anggaran BLUD sebesar Rp.7.641.352.924,00 berasal dari surplus Pendapatan BLUD sebesar Rp. 11.161.541.717,00 ditambah dengan defisit Belanja BLUD sebesar Rp. 3.520.188.793,00.

B. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2018, realisasi anggaran tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan BLUD 2019 adalah Rp. 104.161.541.717,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.15.694.015.829,00 atau naik 17,74% dari realisasi Pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 88.467.525.888,00.
2. Realisasi Belanja dari dana APBD adalah Rp. 48.042.749.516,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.12.300.032.776,00 atau naik 34,41% dari realisasi Belanja APBD tahun 2018 sebesar Rp. 35.742.716.740,00

3. Realisasi Belanja BLUD adalah Rp.97.545.936.793,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.9.798.771.870,00 atau naik 11,17% dari realisasi Belanja BLUD tahun 2017 sebesar Rp. 87.747.164.923,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga mengalami hambatan dan kendala, diantaranya :

1. Tagihan belanja bahan obat-obatan, alat pakai habis dan bahan laboratorium tidak dapat dibayar di tahun anggaran 2019. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pelayanan namun namun tidak cukup dana karena ada hambatan dalam proses pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BPJS baru membayar klaim sampai dengan pelayanan bulan Oktober 2019.
2. Subsidi belanja obat-obatan sebagai pengganti biaya pelayanan masyarakat miskin tidak mencukupi. Pada Tahun 2019 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga mendapat alokasi dana dari APBD untuk Anggaran Belanja obat-obatan sebesar Rp.7.500.000.000,00. Dana tersebut merupakan kompensasi terhadap RSUD atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin, Pasien pengguna Kartu Purbalingga Sehat (KPS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dengan diberlakukannya KPS dan SKTM, alokasi anggaran subsidi belanja obat tidak sebanding dengan pembiayaan pelayanan masyarakat miskin, sehingga membebani operasional rumah sakit. Terlihat ada penurunan pelayanan rawat inap karena pengguna SKTM kasus persalinan dijamin oleh program Jampersal. SKTM untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang relatif mudah, apabila tidak dikendalikan maka akan semakin membebani APBD.
3. Pasien yang belum bisa melunasi biaya perawatan merupakan juga kendala yang dalam pencapaian target pendapatan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Piutang Pelayanan Kesehatan yang timbul karena pasien tidak dapat melunasi biaya perawatan baik sebagian maupun seluruhnya, pihak RSUD telah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan agar nilai piutang tersebut tidak terlalu tinggi dengan salah satu cara mengirimkan surat tagihan kepada penanggungjawab pasien, namun demikian pada kenyataannya setiap tahun nilai piutang tersebut semakin bertambah. Pihak Manajemen RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga senantiasa berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual paling lambat pada tahun 2015. Salah satu infrastruktur pendukung yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, yang harus sudah ditetapkan paling lambar 31 Mei 2014.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014.

Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain:

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,

kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pengukuran Aset

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.
Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).

b. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

c. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizablevalue*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	>3-4 Tahun	Macet	100%

3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

e. Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran / dibayarkan.

f. Persediaan diukur dan dicatat sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;

4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan

5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Permanen dinilai.

Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode Biaya
adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas
adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Investasi Jangka Panjang yang bersifat non permanen diukur sebagai berikut:

a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

e) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1.	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

b. Aset Tetap

1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

   a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;
   b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**; dan
   c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

5) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

6) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

8) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan

b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset:

i. Biaya persiapan tempat;
ii. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
iii. Biaya pemasangan (*installation cost*);
iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
v. Biaya konstruksi; dan
vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

c) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

9) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan

disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

c) Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
   i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
      - bertambah masa manfaat, dan/atau
      - bertambah kapasitas, dan/atau
      - bertambah kualitas, dan/atau
      - bertambah volume.
   ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

10) Penyajian Aset Tetap

a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{(N \quad y \quad d \quad d \qquad)}{(M \quad m \qquad)}$$

Keterangan:
Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

c) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.

d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

c. Dana Cadangan

1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
   a) Tagihan Penjualan Angsuran;
   b) Tuntutan Ganti Rugi;
   c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d) Aset Tak Berwujud; dan
   e) Aset Lain-lain.
   Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat

disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

B. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek

   adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

   Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

   Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

   adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan - LRA diakui pada saat:
   a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening Bendahara JKN pada FKTP.
   d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   e. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   f. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

E. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

b. Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD.

c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

d. Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

F. Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer

pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

c. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

G. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

H. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.

4. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah-LO yang bersifat *official assessment* yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan-LO atas pajak-pajak lainnya diakui bersamaan dengan pengakuan Pendapatan-LRA yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD.

5. Sedangkan Pendapatan Retribusi-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO).

6.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.104.161.541.717,00 atau mencapai 112,00% dari target sebesar Rp.93.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan BLUD.

Realisasi Pendapatan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.15.694.015.829,00 atau naik 17,74% dari realisasi tahun 2018. Perkembangan realisasi Pendapatan tahun 2017-2019 terlihat pada grafik di bawah.

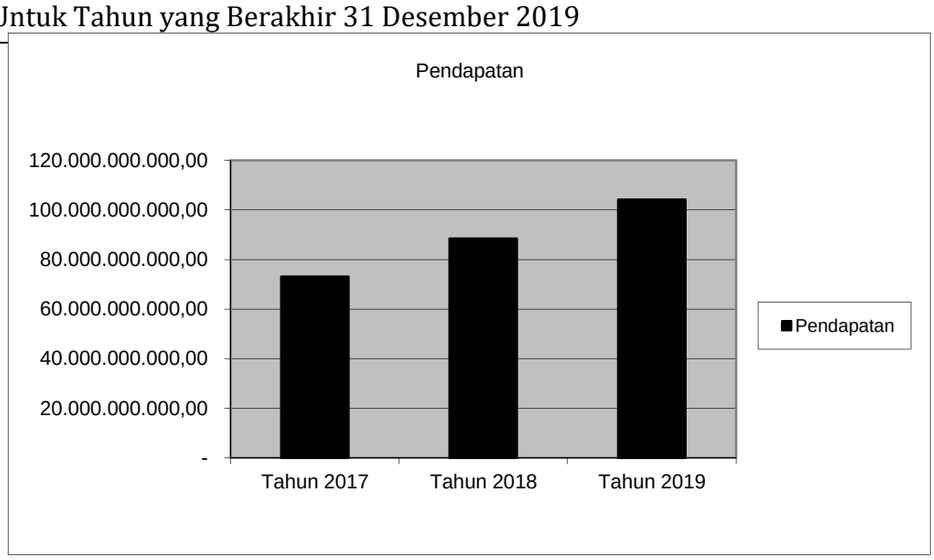

Grafik. Perkembangan Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2017-2019

Realisasi Belanja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.145.588.686.309,00 atau mencapai 88,56% dari anggaran sebesar Rp.164.399.373.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.124.314.730.879,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.21.273.955.430,00.

Realisasi Belanja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.22.098.804.646,00 atau naik 17,90% dari realisasi tahun 2018. Perkembangan realisasi Belanja tahun 2017-2019 terlihat pada grafik di bawah.

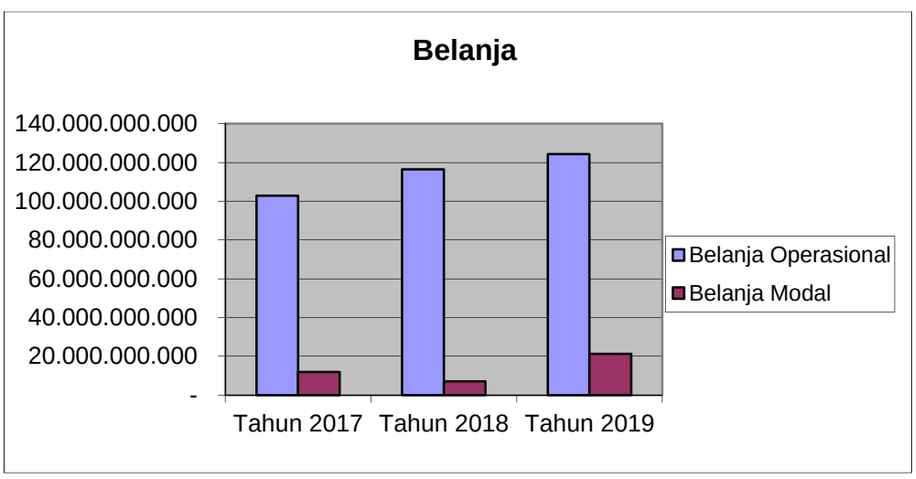

Grafik. Perkembangan Realisasi Belanja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2017-2019

Dari realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut, maka pada tahun 2019, terdapat defisit sebesar Rp.41.427.144.592,00.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana berikut :

5.1.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN_____Rp.104.161.541.717,00

Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.104.161.541.717,00 atau mencapai 112,00% dari target sebesar Rp.93.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan BLUD, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :

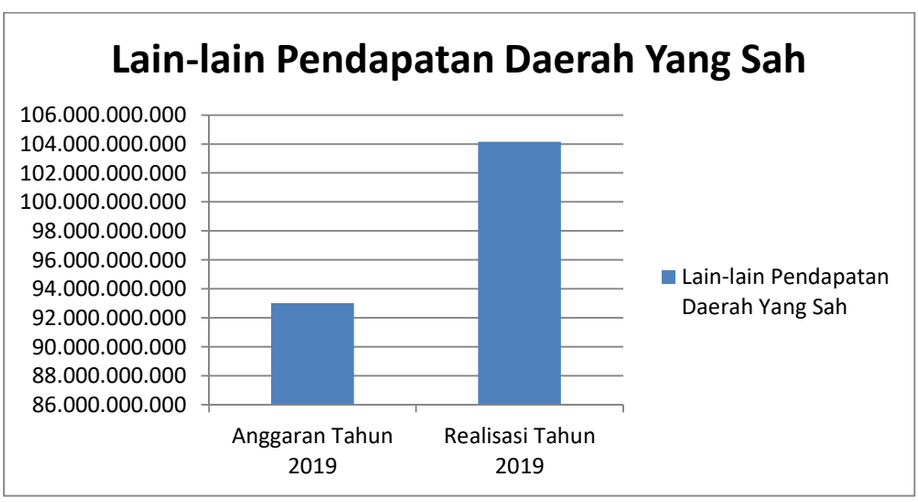

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi Pendapatan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.15.694.015.829,00 atau naik 17,74% dari realisasi tahun 2018, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	2019		2018	Kenaikan/ (Penurunan)	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	93.000.000.000,00	104.161.541.717,00	88.467.525.888,00	15.694.015.829,00	17,74%
Jasa Pelayanan	91.600.000.000,00	102.216.210.529,00	87.267.195.942,00	14.949.014.587,00	17,13%
Hasil Kerjasama	400.000.000,00	527.321.911,00	583.128.334,00	-55.806.423,00	-9,57%
Pendapatan Lain yang Sah	1.000.000.000,00	1.418.009.277,00	617.201.612,00	800.807.665,00	129,75%

Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga berdasarkan Realisasi tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

Data sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Sumber Pendapatan BLUD	2019
I	**Pendapatan Jasa Layanan:**	
1	Pelayanan Pasien Umum/Iur Biaya	17.614.764.606,00
2	BPJS Kesehatan	81.462.396.480,00
3	PT. Asuransi Inhealth	12.118.571,00
4	Jasa Raharja	1.065.681.684,00
5	Yakes Telkom	118.223.310,00
6	Jamkesda Banjarnegara	125.854.443,00
7	Jaminan Kecelakaan Kerja	44.286.604,00
8	BNN	617.500,00
9	GFTB Dinkes Prov. Jateng	70.361.152,00
10	Klaim PT.KAI	24.623.985,00
11	Klaim Jampersal	1.608.316.400,00
12	Pelayanan GCU	68.965.794,00
II	**Hasil Kerja Sama :**	
1	MOU Institusi Pendidikan/Diklat	391.509.000,00
2	Parkir	51.612.911,00
3	Perjanjian (Sewa)	84.200.000,00
III	**Pendapatan Lain-lain BLUD yang sah:**	
1	Bunga Bank (Giro/Deposito)	422.942.844,00
2	Listrik perumahan paramedis, dll	995.066.433,00
	Jumlah	**104.161.541.717,00**

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2019

B. BELANJA_____Rp.145.588.686.309,00

Realisasi Belanja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.145.588.686.309,00 atau mencapai 88,56% dari anggaran sebesar Rp.164.399.373.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.22.098.804.646,00 atau naik 17,90%.

Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Berdasarkan jenis, realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.124.314.730.879,00 (100,38%) dan Belanja Modal sebesar Rp.21.273.955.430,00 (52,45%).

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, peningkatan terbesar Belanja tahun 2019 terjadi pada Belanja Modal yang naik sebesar Rp.14.302.522.240,00 atau naik 205,16% sedangkan Belanja Operasional mengalami peningkatan hanya sebesar Rp.7.796.282.406,00 atau naik 6,69% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	2019		2018	Kenaikan/ (Penurunan)	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA	**164.399.373.000,00**	**145.588.686.309,00**	**123.489.881.663,00**	**22.098.804.646,00**	**17,90%**
BELANJA OPERASI	**123.839.939.000,00**	**124.314.730.879,00**	**116.518.448.473,00**	**7.796.282.406,00**	**6,69%**
Belanja Pegawai	38.465.886.000,00	70.540.098.926,00	68.905.615.291,00	1.634.483.635,00	2,37%
Belanja Barang dan Jasa	85.374.053.000,00	53.774.631.953,00	47.612.833.182,00	6.161.798.771,00	12,94%
BELANJA MODAL	**40.559.434.000,00**	**21.273.955.430,00**	**6.971.433.190,00**	**14.302.522.240,00**	**205,16%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.671.735.000,00	1.492.839.496,00	6.971.433.190,00	-5.478.593.694,00	-78,59%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.689.699.000,00	19.342.465.934,00		19.342.465.934,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.000.000,00	438.650.000,00		438.650.000,00	

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Sesuai dengan BULTEK Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, berdasarkan kelompoknya, Belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai Belanja Langsung sedangkan belanja yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai Belanja Tidak Langsung.

URAIAN	2019		2018	Kenaikan/ (Penurunan)	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Tidak Langsung	30.743.426.000,00	25.447.879.440,00	23.740.398.215,00	1.707.481.225,00	7,19%
Belanja Langsung	133.655.947.000,00	120.140.806.869,00	99.749.483.448,00	20.391.323.421,00	20,44%
Jumlah	**164.399.373.000,00**	**145.588.686.309,00**	**123.489.881.663,00**	**22.098.804.646,00**	**17,90%**

Realisasi Belanja Langsung tahun 2019 mencapai Rp. 120.140.806.869,00 atau 89,89% sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.25.447.879.440,00 atau 82,78% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.

Realisasi Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp.20.391.323.421,00 atau naik 20,44% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp.1.707.481.225,00 atau naik 7,19%.

Rasio perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 adalah 82,52% berbanding 17,48%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk membiayai biaya *overhead* yang terkait dengan pelaksanaan operasional Rumah Sakit secara umum.

Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2019 dapat digambarkan seperti dalam penjelasan di bawah.

1. **Belanja Operasi_____Rp.124.314.730.879,00**

   Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.124.314.730.879,00 atau 100,38% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp.123.839.939.000,00. Belanja Operasi tersebut merupakan 85,39% dari total Belanja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019.

   Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.7.796.282.406,00 atau naik 6,69%. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan Belanja Barang dan Jasa dan juga Belanja Pegawai masing-masing sebesar Rp.6.161.798.771,00 dan Rp.1.634.483.635,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	2019		2018	Kenaikan/ (Penurunan)	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	38.465.886.000,00	70.540.098.926,00	68.905.615.291,00	1.634.483.635,00	2,37%
Belanja Barang dan Jasa	85.374.053.000,00	53.774.631.953,00	47.612.833.182,00	6.161.798.771,00	12,94%
Jumlah	123.839.939.000,00	124.314.730.879,00	116.518.448.473,00	7.796.282.406,00	6,69%

a. Belanja Pegawai_____Rp.70.540.098.926,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.70.540.098.926,00 atau 183,38% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp.38.465.886.000,00. Jumlah Belanja Pegawai tersebut merupakan 48,45% dari total Belanja RSUD.

URAIAN	REALISASI		KENAIKAN / PENURUNAN	
	2019	2018		
	Rp	Rp	Rp	%
BELANJA APBD				
BELANJA TAK LANGSUNG	**25.447.879.440,00**	**23.740.398.215,00**	**1.707.481.225,00**	**7,19%**
Gaji Pokok PNS	19.499.078.352,00	18.185.895.300,00	1.313.183.052,00	7,22%
Tunjangan Keluarga	1.816.127.866,00	1.703.828.228,00	112.299.638,00	6,59%
Tunjangan Jabatan	127.900.000,00	137.140.000,00	(9.240.000,00)	-6,74%
Tunjangan Fungsional	1.847.455.000,00	1.650.050.000,00	197.405.000,00	11,96%
Tunjangan Fungsional Umum	360.275.000,00	346.820.000,00	13.455.000,00	3,88%
Tunjangan Beras				0,56%

	1.028.001.900,00	1.022.280.720,00	5.721.180,00	
Tunjangan PPh / Khusus	59.361.120,00	-	59.361.120,00	-
Pembulatan Gaji	300.806,00	254.010,00	46.796,00	18,42%
Iuran Asuransi Kesehatan	548.912.815,00	511.937.149,00	36.975.666,00	7,22%
Iuran Jaminan Kematian	120.348.550,00	144.749.456,00	(24.400.906,00)	-16,86%
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	40.118.031,00	37.443.352,00	2.674.679,00	7,14%
BELANJA BLUD			**-**	
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD			-	
PENYEDIAAN BAHAN DAN JASA PERKANTORAN	**45.005.269.486**	**45.019.617.076**	**(14.347.590)**	-0,03%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.612.500	76.702.500	2.910.000,00	3,79%
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	21.700.000	23.900.000	(2.200.000,00)	-9,21%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	23.650.000	9.400.000	14.250.000,00	151,60%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	291.933.000	318.928.000	(26.995.000,00)	-8,46%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	62.000.000	66.300.000	(4.300.000,00)	-6,49%
Uang Lembur PNS	106.123.500	96.517.500	9.606.000,00	9,95%
Uang Lembur Non PNS	59.812.500	44.972.000	14.840.500,00	33,00%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.445.022.650	6.739.816.200	(294.793.550,00)	-4,37%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	115.950.000	112.900.000	3.050.000,00	2,70%
Belanja Jasa Medis	37.799.465.336	37.530.180.876	269.284.460,00	0,72%
PEMELIHARAAN SARPRAS RSUD	**-**	**6.300.000**	**(6.300.000)**	-100,00%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		300.000	(300.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD		6.000.000	(6.000.000,00)	-100,00%
PENGADAAN ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS	**-**	**2.700.000**	**(2.700.000)**	-100,00%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		300.000	(300.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD		2.400.000	(2.400.000,00)	-100,00%
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM	**-**	**2.700.000**	**(2.700.000)**	-100,00%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		300.000	(300.000,00)	-100,00%

Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD		2.400.000	(2.400.000,00)	-100,00%
PENGADAAN PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS	**-**	**5.500.000**	**(5.500.000)**	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD		5.500.000	(5.500.000,00)	-100,00%
PENGADAAN OBAT	**-**	**6.300.000**	**(6.300.000)**	-100,00%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		300.000	(300.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD		6.000.000	(6.000.000,00)	-100,00%
REHABILITASI SARANA PRASARANA DAN PENATAAN LINGKUNGAN RS	**-**	**5.300.000**	**(5.300.000)**	**-100,00%**
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		300.000	(300.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD		5.000.000	(5.000.000,00)	-100,00%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	**9.950.000**	**15.700.000**	**(5.750.000)**	-36,62%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000	1.900.000	200.000,00	10,53%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD		3.000.000	(3.000.000,00)	-100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Non PNS)		950.000	(950.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD (Non PNS)		2.100.000	(2.100.000,00)	-100,00%
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS)	7.850.000	7.750.000	100.000,00	1,29%
AKREDITASI	**77.000.000**	**92.875.000**	**(15.875.000)**	-17,09%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.200.000	82.125.000	(15.925.000,00)	-19,39%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	10.800.000	4.500.000	6.300.000,00	140,00%
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		6.250.000	(6.250.000,00)	-100,00%
PENYEMPURNAAN SIM-RS	**-**	**4.300.000**	**(4.300.000)**	-100,00%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	300.000	(300.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	-	4.000.000	(4.000.000,00)	-100,00%
E REKAM MEDIK	**-**	**3.925.000**	**(3.925.000)**	-100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	420.000	(420.000,00)	-100,00%
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	200.000	(200.000,00)	-100,00%
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	-	1.625.000	(1.625.000,00)	-100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	-	1.680.000	(1.680.000,00)	-100,00%
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**70.540.098.926**	**68.905.615.291**	**1.634.483.635**	**2,37%**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, angka tersebut diatas mengalami peningkatan sebesar Rp.1.634.483.635,00 atau naik 2,37%.

Realisasi belanja terbesar untuk kelompok Belanja Pegawai ada di Belanja Langsung yang berasal dari dana BLUD yaitu Belanja Jasa Medis dengan jumlah Rp.37.799.465.336,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp.269.284.460,00 atau naik 0,72% dari realisasi Belanja Tahun 2018 yang hanya sebesar Rp.37.530.180.876,00.

Belanja Jasa Medis ini pada awalnya sejumlah Rp.45.749.274.311,00 terealisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa di rekening Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ini terbagi menjadi dua kategori yaitu belanja Jasa Medis yang dibagikan kepada pegawai RSUD sejumlah Rp.37.799.465.336,00 dan belanja jasa pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan Laborat Luar Rumah Sakit, CT Scan Luar Rumah Sakit dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap sejumlah Rp.7.949.808.975,00 sehingga pada saat penyajian belanja Jasa Medis di reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Pegawai melalui jurnal koreksi sebesar Rp.37.799.465.336,00.

Reklasifikasi Belanja inilah yang mendorong kenaikan Belanja Pegawai di Tahun 2019 sekaligus membuat seolah Belanja Pegawai ini melampaui Anggaran dari Belanja Pegawai yang telah ditetapkan di Tahun 2019 dari Anggaran Belanja Pegawai 2019 sejumlah Rp.38.465.886.000,00 terealisasi sebesar Rp.70.540.098.926,00 atau mencapai 183,38%.

b. Belanja Barang dan Jasa_____Rp.53.774.631.953,00

Realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.53.774.631.953,00 atau 62,99% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp.85.374.053.000,00. Jumlah Belanja Barang/Jasa tersebut merupakan 36,94% dari total Belanja RSUD tahun 2019. Rincian Belanja Barang/Jasa tahun 2018 sebagai berikut.

URAIAN	REALISASI		KENAIKAN / PENURUNAN	
	2019	2018		
	Rp	Rp	Rp	%
BELANJA APBD				
Subsidi Pembelian Obat-obatan RSUD sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin	**7.499.659.508,00**	**8.498.393.160,00**	**(998.733.652,00)**	**100,00%**
Belanja Bahan Obat-obatan	7.499.659.508	8.498.393.160	(998.733.652,00)	-11,75%
BELANJA BLUD				
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
PENYEDIAAN BAHAN DAN JASA PERKANTORAN	**15.376.210.005**	**14.927.524.248**	**448.685.757**	3,01%
Belanja Alat Tulis Kantor	561.014.504	451.694.550	109.319.954	24,20%
Belanja Perangko,Meterai dan Benda Pos Lainnya	6.168.000	7.404.000	(1.236.000)	-16,69%
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	451.932.152	468.843.814	(16.911.662)	-3,61%
Belanja Pengisian Tabung Gas	219.100.000	227.410.000	(8.310.000)	-3,65%
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	70.000	5.360.550	(5.290.550)	-98,69%
Belanja Perlengkapan rumah tangga	4.825.150	19.550.300	(14.725.150)	-75,32%
Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	253.835.450	269.983.490	(16.148.040)	-5,98%
Belanja Telepon	21.935.315	34.344.528	(12.409.213)	-36,13%
Belanja Air	297.761.620	297.896.440	(134.820)	-0,05%
Belanja Listrik	1.216.626.768	1.146.781.008	69.845.760	6,09%
Belanja Surat Kabar/Majalah	15.805.400	24.382.800	(8.577.400)	-35,18%
Belanja Kawat/faximile/Internet	51.209.490	49.883.230	1.326.260	2,66%
Belanja Paket/Pengiriman	2.892.400	2.599.500	292.900	11,27%
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	32.014.880	30.034.906	1.979.974	6,59%
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.949.808.975	7.625.119.253	324.689.722	4,26%
Belanja Jasa Publikasi	134.972.726	162.827.325	(27.854.599)	-17,11%
Belanja Jasa Dekorasi	4.500.000	4.113.750	386.250	9,39%
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.945.645	10.738.525	(2.792.880)	-26,01%
Belanja Premi Tanggung Gugat	93.344.000	100.190.000	(6.846.000)	-6,83%
Belanja Jasa Service		9.973.790	(9.973.790)	-100,00%
Belanja Penggantian Suku Cadang		51.142.950	(51.142.950)	-100,00%

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	105.195.681	88.400.080	16.795.601	19,00%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		5.986.825	(5.986.825)	-100,00%
Belanja Cetak	598.447.000	503.146.940	95.300.060	18,94%
Belanja Penggandaan	99.635.450	85.815.825	13.819.625	16,10%
Belanja sewa peralatan lainnya	54.042.532		54.042.532	-
Belanja sewa peralatan kantor		74.658.262	(74.658.262)	-100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Harian pegawai	1.381.705.680	1.327.735.550	53.970.130	4,06%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.201.450	89.055.500	22.145.950	24,87%
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.209.800	40.967.800	(28.758.000)	-70,20%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.667.637.562	1.631.466.257	36.171.305	2,22%
Belanja Pakaian kerja Lapangan	19.347.375	77.197.500	(57.850.125)	-74,94%
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.025.000	2.819.000	(1.794.000)	-63,64%
REHAB DAN PEMELIHARAAN SARPRAS RSUD	**4.610.107.498**	**4.488.657.123**	**121.450.375**	2,71%
Belanja alat listrik dan elektronik	78.790.650	87.217.450	(8.426.800)	-9,66%
Belanja bahan/bibit tanaman		4.103.000	(4.103.000)	-100,00%
Belanja jasa pihak ketiga	1.042.416.952	836.888.440	205.528.512	24,56%
Belanja Jasa Service	15.809.400		15.809.400	-
Belanja Penggantian Suku Cadang	80.276.500		80.276.500	-
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	16.304.050	8.459.000	7.845.050	92,74%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.444.175		5.444.175	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.670.770.100	2.292.226.550	(621.456.450)	-27,11%
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	397.077.950	689.176.550	(292.098.600)	-42,38%
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kedokteran	1.303.217.721	570.586.133	732.631.588	128,40%
PENGADAAN ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS	**8.642.079.488**	**7.526.312.722**	**1.115.766.766**	14,82%
Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	8.642.079.488	7.526.312.722	1.115.766.766	14,82%
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM	**4.014.006.130**	**2.907.114.797**	**1.106.891.333**	38,08%
Belanja Bahan Laboratorium	4.014.006.130	2.907.114.797	1.106.891.333	38,08%
PENGADAAN PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS	**147.575.451**	**25.243.795**	**122.331.656**	484,60%
Belanja Perlengkapan rumah tangga	63.260.418	11.334.799	51.925.619	458,11%
Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	44.072.033	13.908.996	30.163.037	216,86%

Belanja Jasa Publikasi	40.243.000		40.243.000	-
PENGADAAN OBAT	**12.263.148.137**	**7.655.212.028**	**4.607.936.109**	60,19%
Belanja Bahan Obat-obatan	12.263.148.137	7.655.212.028	4.607.936.109	60,19%
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	**248.875.349**	**231.778.200**	**17.097.149**	7,38%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.505.000	16.015.000	3.490.000	21,79%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.370.349	215.763.200	13.607.149	6,31%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	**772.395.166**	**886.093.055**	**(113.697.889)**	-12,83%
Belanja Alat Tulis Kantor	5.730.000	3.453.000	2.277.000	65,94%
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.593.500	70.000	1.523.500	2176,43%
Belanja jasa pihak ketiga	53.091.000		53.091.000	-
Belanja Jasa Akomodasi		640.000	(640.000)	-100,00%
Belanja jasa Dekorasi	1.780.000	1.000.000	780.000	78,00%
Belanja Penggandaan	327.700	1.729.000	(1.401.300)	-81,05%
Belanja Sewa Peralatan Praktek	400.000	480.000	(80.000)	-16,67%
Belanja Makanan dan Minuman rapat	52.870.200	38.647.300	14.222.900	36,80%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		10.153.425	(10.153.425)	-100,00%
Belanja Beasiswa Pendidikan S1	12.000.000	18.000.000	(6.000.000)	-33,33%
Belanja Kursus-kursus Singkat	644.602.766	811.920.330	(167.317.564)	-20,61%
AKREDITASI	**200.575.221**	**276.504.054**	**(75.928.833)**	-27,46%
Belanja Jasa Transaksi Keuangan		5.000	(5.000)	-100,00%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.312.000	20.384.000	32.928.000	161,54%
Belanja Jasa Publikasi		59.452.450	(59.452.450)	-100,00%
Belanja Jasa Akomodasi	25.502.000	1.997.500	23.504.500	1176,70%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.748.240	46.926.890	(3.178.650)	-6,77%
Belanja makanan dan minuman tamu		1.942.214	(1.942.214)	-100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.726.981	5.655.000	6.071.981	107,37%
Belanja Kursus-kursus Singkat	66.286.000	140.141.000	(73.855.000)	-52,70%
PENYEMPURNAAN SIM-RS	**-**	**190.000.000**	**(190.000.000)**	-100,00%
Pemeliharaan dan Pengembangan SIM-RS	-	190.000.000	(190.000.000)	-100,00%
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	**53.774.631.953**	**47.612.833.182**	**6.161.798.771**	**12,94%**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, angka tersebut diatas mengalami peningkatan sebesar Rp.6.161.798.771,00 atau naik 12,94%.

Realisasi belanja terbesar untuk kelompok Belanja Barang/Jasa adalah Belanja Bahan Obat-obatan baik di belanja BLUD maupun APBD, di BLUD dengan jumlah Rp.12.263.148.137,00 sedangkan di APBD sejumlah Rp.7.499.659.508,00 di tahun 2019.

2. Belanja Modal_____Rp.21.273.955.430,00

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.21.273.955.430,00 atau 52,45% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp.40.559.434.000,00. Belanja Modal tersebut memberikan kontribusi sebesar 14,61% dari total Belanja RSUD tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.14.302.522.240,00 atau naik 205,16% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	REALISASI		KENAIKAN / PENURUNAN	
	2019	2018		
	Rp	Rp	Rp	%
BELANJA APBD				
Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	**15.095.210.568,00**	**-**	**15.095.210.568,00**	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	15.095.210.568,00		15.095.210.568,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di RSUD Goeteng Taroenadibrata Kab. Purbalingga (Bangub 2019, DAK 2018)	**-**	**3.503.925.365,00**	**(3.503.925.365,00)**	**-100,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	-		-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	-	852.810.250,00	(852.810.250,00)	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	804.002.278,00	(804.002.278,00)	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	-	67.625.000,00	(67.625.000,00)	-100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	-	734.000.000,00	(734.000.000,00)	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	-	1.045.487.837,00	(1.045.487.837,00)	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	-		-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	-		-	
BELANJA BLUD			**-**	
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD			-	
REHAB DAN PEMELIHARAAN SARPRAS RSUD	**581.550.000**	**-**	**581.550.000**	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	66.500.000		66.500.000,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Ground Tank	76.400.000		76.400.000,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Tiang Jaringan Listrik	95.000.000		95.000.000,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	343.650.000		343.650.000,00	
PENGADAAN PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS	**1.426.339.496**	**3.344.787.825**	**(1.918.448.329)**	**-57,36%**
Belanja modal pengadaan sepeda	8.321.500	6.145.000	2.176.500,00	35,42%
Belanja modal pengadaan kereta dorong	5.890.500	3.066.498	2.824.002,00	92,09%
Belanja modal pengadaan peralatan pertukangan	14.648.172		14.648.172,00	
Belanja modal pengadaan peralatan kebersihan	3.808.550		3.808.550,00	
Belanja modal pengadaan almari	8.300.000	20.161.690	(11.861.690,00)	-58,83%
Belanja modal pengadaan filling kabinet		9.393.973	(9.393.973,00)	-100,00%
Belanja modal televise		45.472.000	(45.472.000,00)	-100,00%
Belanja modal perlengkapan sound system	8.477.600		8.477.600,00	
Belanja modal AC / kipas angin	160.886.000	31.259.200	129.626.800,00	414,68%
Belanja modal papan nama/data	20.500.000		20.500.000,00	
Belanja modal pengadaan komputer/PC	146.903.500	37.735.000	109.168.500,00	289,30%
Belanja modal pengadaan printer	42.752.000	11.965.000	30.787.000,00	257,31%

Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer	896.000	1.267.513	(371.513,00)	-29,31%
Belanja modal pengadaan Meja Kerja	14.396.800	46.628.994	(32.232.194,00)	-69,12%
Belanja modal pengadaan Kursi Kerja	60.052.425	163.289.994	(103.237.569,00)	-63,22%
Belanja modal pengadaan etalase		94.737.600	(94.737.600,00)	-100,00%
Belanja modal Podium/Mimbar		5.600.000	(5.600.000,00)	-100,00%
Belanja modal pengadaan Dispenser	5.708.000		5.708.000,00	
Belanja modal pengadaan Kulkas	3.998.500	1.595.000	2.403.500,00	150,69%
Belanja Modal Mesin cuci / pengering pakaian / dryer / setrika		8.120.000	(8.120.000,00)	-100,00%
Belanja Modal Pengadaan peralatan memasak		1.964.000	(1.964.000,00)	-100,00%
Belanja modal pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	105.329.900	11.212.500	94.117.400,00	839,40%
Belanja modal perlengkapan tempat tidur	2.500.000		2.500.000,00	
Belanja modal pengadaan Telpon	6.384.000	999.000	5.385.000,00	539,04%
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	96.066.800	654.604.238	(558.537.438,00)	-85,32%
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	12.369.088	74.686.625	(62.317.537,00)	-83,44%
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT	475.142.781		475.142.781,00	
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	93.600.000		93.600.000,00	
Belanja modal pengadaan alat kedokteran kebidanan/kandungan		1.206.870.000	(1.206.870.000,00)	-100,00%
Belanja modal pengadaan alat kedokteran neurologi		817.014.000	(817.014.000,00)	-100,00%
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedy	111.448.400		111.448.400,00	
Belanja modal pengadaan alat-alat Farmasi	555.000		555.000,00	
Belanja modal pengadaan alat-alat Radiologi	3.300.000	83.600.000	(80.300.000,00)	-96,05%
Belanja modal pengadaan alat-alat Laboratorium Kesehatan	9.239.998		9.239.998,00	
Belanja modal pengadaan pompa air	4.863.982	7.400.000	(2.536.018,00)	-34,27%
Belanja modal pengadaan GenSet	-		-	
E REKAM MEDIK	**-**	**122.720.000**	**(122.720.000)**	**-100,00%**
Belanja modal pengadaan komputer/PC		122.720.000	(122.720.000,00)	-100,00%
PENDAMPINGAN PEMB. GED. IBS	**4.170.855.366**	**-**	**4.170.855.366**	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan (Ruang Operasi)	4.170.855.366		4.170.855.366,00	

JUMLAH BELANJA MODAL	**21.273.955.430**	**6.971.433.190**	**14.302.522.240**	**205,16%**

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin_____Rp.1.492.839.496,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.492.839.496,00 atau 8,00% dari anggaran yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp.18.671.735.000,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI (Rp)		KENAIKAN / PENURUNAN	
	2019	2018	(Rp)	%
BM Alat-alat Angkut	14.212.000,00	6.145.000,00	8.067.000,00	131,28%
BM Alat-alat Bengkel	14.648.172,00		14.648.172,00	
BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	465.321.757,00	623.588.962,00	(158.267.205,00)	-25,38%
BM Komputer	190.551.500,00		190.551.500,00	
BM Alat Studio dan Komunikasi	6.384.000,00	999.000,00	5.385.000,00	539,04%
BM Alat Kedokteran	792.482.069,00	6.340.700.228,00	(5.548.218.159,00)	-87,50%
BM Alat Laboratorium	9.239.998,00		9.239.998,00	
Jumlah	**1.492.839.496,00**	**6.971.433.190,00**	**(5.478.593.694,00)**	**-78,59%**

Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp.5.478.593.694,00 atau turun 78,59% dibandingkan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp.6.971.433.190,00. Salah satu yang menyebabkan penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin diantaranya adalah realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran yang relatif lebih kecil yaitu sebesar Rp.792.482.069,00 atau turun sebesar Rp.5.548.218.159,00 atau turun 87,50% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp.6.340.700.228,00 pada Tahun 2018.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan___Rp.19.342.465.934,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun 2019 sebesar Rp.19.342.465.934,00 atau 89,18% dari anggaran yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar Rp.21.689.699.000,00.

Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan ini menjadi penyumbang angka terbesar yaitu sebesar 90,92% dari total belanja Modal Rumah Sakit pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.21.273.955.430,00

Jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan otomatis mengalami kenaikan sebesar Rp.19.342.465.934,00 atau naik 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2018, dikarenakan tidak adanya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun 2018, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

URAIAN	REALISASI (Rp)		KENAIKAN / PENURUNAN	
	2019	2018	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	19.266.065.934	-	19.266.065.934	100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Ground Tank	76.400.000		76.400.000	100,00%
Jumlah	**19.342.465.934**	**-**	**19.342.465.934**	

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan__Rp.438.650.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2019 sebesar Rp.438.650.000,00 atau 221,54% dari Anggaran yang telah ditetapkan di Tahun 2019 sebesar Rp.198.000.000,00.

Realisasi tersebut terlihat melampaui anggaran dikarenakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2019, ternyata di Tribulan IV ada kebutuhan belanja yang mendesak yaitu pengadaan jaringan pipa distribusi gas medis dan belanja tersebut belum dianggarkan di Perubahan Anggaran Tahun 2019. Aplikasi SIMDA yang digunakan untuk menyusun DPPA tidak memfasilitasi perubahan-

perubahan yang mendesak sedangkan fleksibilitas BLUD dan karakteristik belanja BLUD Rumah Sakit sangat beragam, oleh karena itu diperlukan pergeseran Anggaran antar sesama jenis Belanja pada hal ini adalah pergeseran sesama Belanja Modal, namun Aplikasi SIMDA tidak memfasilitasi perubahan / pergeseran tersebut dikarenakan Menu perubahan sudah ditutup setelah tanggal penetapan DPPA 2019 sehingga angka Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan masih sesuai pada saat penetapan DPPA yaitu sebesar Rp.198.000.000,00.

Jumlah belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan otomatis mengalami kenaikan sebesar Rp.438.650.000,00 atau naik 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2018, dikarenakan tidak adanya realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

URAIAN	REALISASI (Rp)		KENAIKAN / PENURUNAN	
	2019	2018	(Rp)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Tiang Jaringan Listrik	95.000.000	-	95.000.000,00	100,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	343.650.000		343.650.000,00	100,00%
Jumlah	**438.650.000,00**	-	**438.650.000,00**	100,00%

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A. Saldo Anggaran Lebih Awal_____Rp.1.025.748.962,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah sebesar Rp.1.025.748.965,00. Saldo ini merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018.

B. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan__Rp.1.025.748.000,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.025.748.965,00.

Dari Saldo SAL awal tahun 2019 tersebut, jumlah yang direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2019 lebih kecil yaitu sebesar Rp.1.025.748.000,00 sehingga terdapat selisih pembulatan sebesar Rp.965,00. Saldo SAL tersebut digunakan di Perubahan Anggaran Tahun 2019 atas rekomendasi dari Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA_____Rp.7.641.352.924,00

SiLPA tahun 2019 merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya defisit anggaran sebesar Rp.Rp.3.520.188.793,00 dan pelampauan pendapatan sebesar Rp.11.161.541.717,00 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.641.352.924,00.

Nilai SiLPA tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.6.615.603.959,00 atau naik 644,95% , sangat signifikan dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2018 yang hanya sebesar Rp.1.025.748.965,00

D. Lain-lain_____(Rp.965,00)

Saldo Lain-lain sebesar Rp.965,00 merupakan selisih dari SiLPA 2018 sejumlah Rp.1.025.748.965,00 dan kemudian direalisasikan sebagai pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp.1.025.748.000,00. Saldo Lain-lain ini mengurangi SiLPA tahun sebelumnya yaitu mengurangi SiLPA tahun 2018.

E. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL) Akhir____Rp.7.641.352.924,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.641.352.924,00 yang berasal dari SAL awal Rp.1.025.748.965,00 dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp.1.025.748.000,00 ditambah dengan SiLPA Tahun 2019 dan

dikurangi dengan selisih pembulatan penggunaan SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp.965,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.3.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Secara ringkas, posisi keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Aset Lancar	41.851.534.724,60	32.250.273.785,45	9.601.260.939,15	29,77%
Aset Tetap	89.826.930.904,73	79.673.732.714,28	10.153.198.190,45	12,74%
JUMLAH ASET	**131.678.465.629,33**	**111.924.006.499,73**	**19.754.459.129,60**	**17,65%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.900.201,00	0,00	76.900.201,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	76.250.000,00	79.861.667,00	-3.611.667,00	-4,52%
Utang Belanja	6.380.031.993,00	7.178.901.029,00	-798.869.036,00	-11,13%
Utang Jangka Pendek Lainnya	67.809.725,00	80.430.500,00	-12.620.775,00	-15,69%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.600.991.919,00	7.339.193.196,00	-738.201.277,00	-10,06%
JUMLAH KEWAJIBAN	**6.600.991.919,00**	**7.339.193.196,00**	**-738.201.277,00**	**-10,06%**
EKUITAS				
EKUITAS	**125.077.473.710,33**	**104.584.813.303,73**	**20.492.660.406,60**	**19,59%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**131.678.465.629,33**	**111.924.006.499,73**	**19.754.459.129,60**	17,65%

Dalam periode 3 tahun terakhir, posisi keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menunjukkan trend yang cukup baik. Terlihat dari posisi aset yang kembali meningkat di Tahun 2019 sebesar Rp.19.754.459.129,60 atau naik 17,65% dari Tahun sebelumnya, peningkatan Aset tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah ekuitas sebesar Rp.20.492.660.406,60 atau naik 19,59% dari Tahun 2018 dan penurunan kewajiban sebesar 10,06% atau turun sejumlah Rp.738.201.277,00 sebagaimana grafik berikut ini.

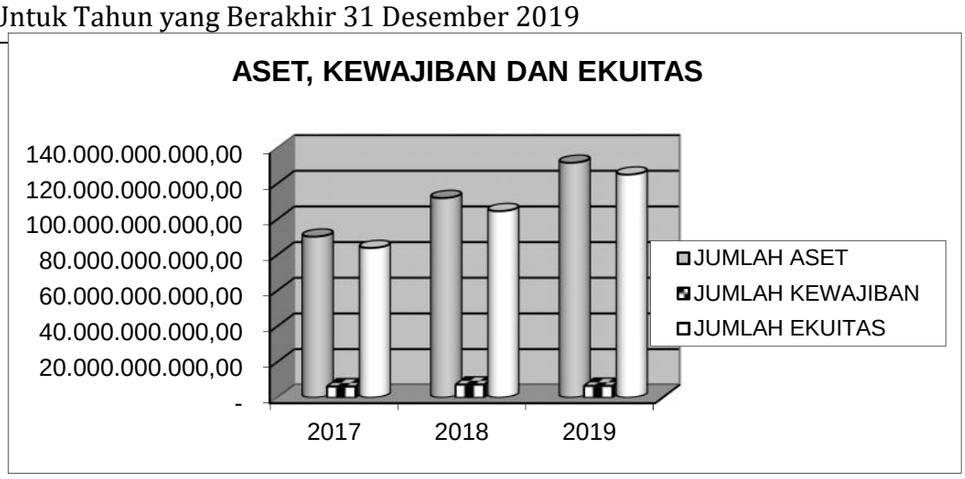

Grafik. Perkembangan posisi keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017-2019

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga terus berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan publik melalui penambahan kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah Aset Tetap tahun 2019 yang mencapai Rp.89.826.930.904,73 meningkat sebesar Rp.10.153.198.190,45 atau naik 12,74% dari posisi tahun 2018.

Penjelasan rinci per masing-masing pos Neraca adalah sebagai berikut:

5.3.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

5.3.2.1 Aset_____Rp.131.678.465.629,33

Posisi Aset RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.131.678.465.629,33 atau naik sebesar Rp.19.754.459.129,60 atau 17,65% dari posisi per 31 Desember 2018.

Nilai Aset tersebut terdiri dari :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
ASET LANCAR	41.851.534.724,60	32.250.273.785,45	9.601.260.939,15	29,77%
ASET TETAP	89.826.930.904,73	79.673.732.714,28	10.153.198.190,45	12,74%
JUMLAH ASET	**131.678.465.629,33**	**111.924.006.499,73**	**19.754.459.129,60**	**17,65%**

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan terjadi pada Aset Lancar dan Aset Tetap dengan peningkatan masing-masing sebesar 29,77% atau sebesar Rp.9.601.260.939,15 pada Aset Lancar dan 12,74% atau sebesar Rp.10.153.198.190,45 pada Aset Tetap.

Komposisi Aset RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.

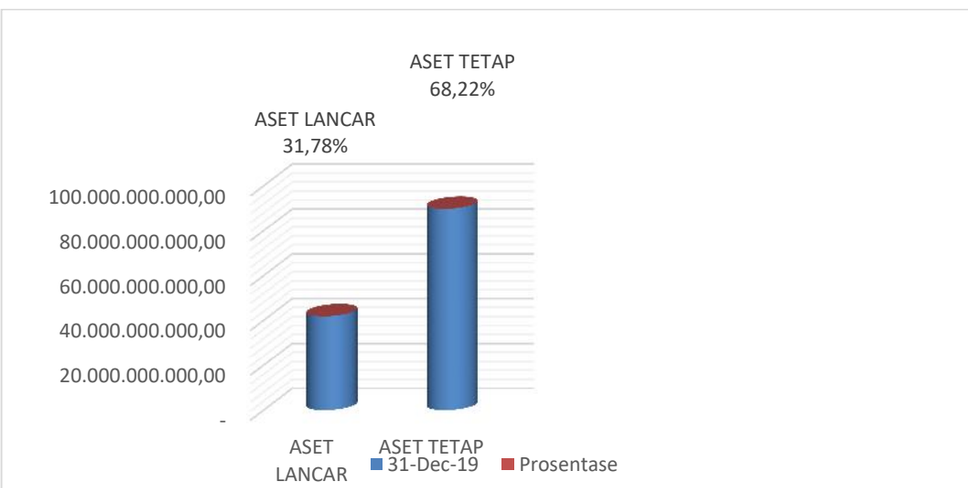

1. **Aset Lancar**

   Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp.41.851.534.724,60 mengalami peningkatan sebesar Rp.9.601.260.939,15 atau naik 29,77% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018.

   Jumlah Aset Lancar tersebut terdiri dari:

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Kas	7.786.064.217,00	1.106.179.867,00	6.679.884.350,00	603,87%
Piutang Pendapatan	28.950.000.029,60	27.839.691.787,45	1.110.308.242,15	3,99%
Beban Dibayar Dimuka	48.257.639,00	52.178.165,00	(3.920.526,00)	-7,51%
Persediaan	5.067.212.839,00	3.252.223.966,00	1.814.988.873,00	55,81%
Jumlah Aset Lancar	**41.851.534.724,60**	**32.250.273.785,45**	**9.601.260.939,15**	**29,77%**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Beban Dibayar Dimuka mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 sedangkan Kas dan Piutang Pendapatan dan Persediaan mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2018.

Komposisi Aset Lancar RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.

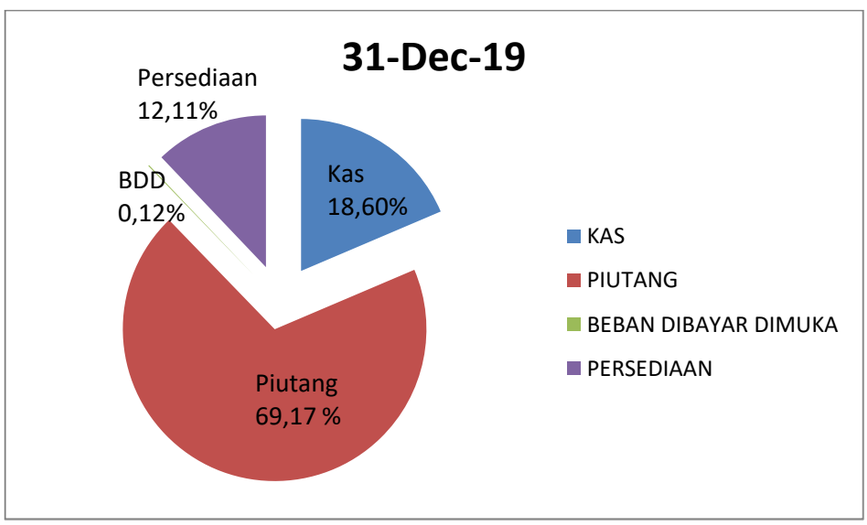

Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi keuangan RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga akhir tahun 2019 sangat liquid di sektor Piutang.

a. Kas_____Rp.7.786.064.217,00

Saldo Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.7.786.064.217,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.679.884.350,00 atau naik 603,87% dari saldo Kas per 31 Desember 2018.

Saldo Kas tersebut merupakan Saldo Kas BLUD sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Kas di BLUD_____Rp.7.786.064.217,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.786.064.217,00 merupakan jumlah Pendapatan BLUD yang masih tersimpan di rekening Bank BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. Rekening	Saldo 31/12/2019 (Rp)
1	Bank Jateng	1-027-022-508	6.978.106.775,00
	Kas dalam perjalanan		12.598.036,00
2	BCA	970999799	148.011.883,00
3	BNI	883966669	73.740.322,00
4	BRI	7401001132308	464.281.808,00
5	Mandiri	180-00-0123749-6	109.325.393,00
Jumlah			**7.786.064.217,00**

Pada tabel di atas terlihat bahwa Bank BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga terdiri dari 5 (lima) Bank yang berbeda yaitu Bank Jateng, BCA, BNI, BRI dan Bank Mandiri.

Sampai dengan 31 Desember 2019 Saldo Kas BLUD sebesar Rp.7.786.064.217,00 terdiri dari saldo Kas BLUD sebesar Rp.7.641.354.291,00 dan Saldo Jaminan Pemeliharaan Pihak Ketiga Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.67.809.725,00 serta potongan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai tidak tetap RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga bulan Desember 2019 yang belum disetorkan ke Bank BRI sebesar Rp.76.900.201,00

b. Piutang Pendapatan_____Rp.28.950.000.029,60

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.28.950.000.029,60 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.110.308.242,15 atau naik 3,99% dibandingkan saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018.

Kenaikan tersebut terlihat dalam tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.063.772.672,00	28.843.783.212,00	1.219.989.460,00	4,23%
Penyisihan Piutang tak Tertagih	-1.113.772.642,40	-1.004.091.424,55	-109.681.217,85	10,92%
Jumlah Piutang Pendapatan	28.950.000.029,60	27.839.691.787,45	1.110.308.242,15	3,99%

Kenaikan Piutang tersebut tidak baik karena semakin besar piutang, semakin besar pula risiko terjadinya piutang tak tertagih.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah_____Rp.30.063.772.672,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.30.063.772.672,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.219.989.460,00 atau naik 4,23% dari posisi per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Piutang Pasien	1.388.004.064,00	1.327.180.156,00	60.823.908,00	4,58%
Piutang Jasa Pelayanan BLUD	28.612.520.608,00	27.487.855.056,00	1.124.665.552,00	4,09%
Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD	63.248.000,00	28.748.000,00	34.500.000,00	120,01%
Jumlah	**30.063.772.672,00**	**28.843.783.212**	**1.219.989.460,00**	**4,23%**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 berasal dari mutasi tambah sebesar Rp.28.701.125.850,00 dan mutasi kurang sebesar Rp.27.481.136.390,00 sebagaimana tabel di bawah.

Uraian	Piutang awal	masuk	keluar	Piutang Akhir
Piutang Pasien	1.327.180.156,00	63.345.074,00	2.521.166,00	1.388.004.064,00
Piutang Jasa Pelayanan BLUD	27.487.855.056,00	28.585.280.776,00	27.460.615.224,00	28.612.520.608,00
Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD	28.748.000,00	52.500.000,00	18.000.000,00	63.248.000,00
Jumlah	**28.843.783.212,00**	**28.701.125.850,00**	**27.481.136.390,00**	**30.063.772.672,00**

(a) Piutang Pasien

Piutang Pasien per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.388.004.064,00 merupakan saldo Piutang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata kepada pasien yang timbul karena ketidakmampuan pasien untuk membayar biaya perawatan, baik sebagian maupun keseluruhan.

Jumlah Piutang Pasien tersebut terdiri dari akumulasi saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.327.180.156,00 ditambah dengan piutang pasien Tahun 2019 sebesar Rp.60.823.908,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

URAIAN	31-Dec-19 (Rp)	31-Dec-18 (Rp)	%
Piutang Pasien Tahun 2019	63.345.074	0	100,00%
Piutang Pasien Tahun 2018	49.835.573	52.356.739	95,18%
Piutang Pasien Tahun 2017	99.182.714	99.182.714	100,00%
Piutang Pasien Tahun 2016	193.991.893	193.991.893	100,00%
Piutang Pasien Tahun 2015	89.621.661	89.621.661	100,00%
Piutang Pasien Tahun 2014	109.017.584	109.017.584	100,00%
Piutang Pasien Tahun 2013	110.978.261	110.978.261	100,00%
Piutang Pasien Tahun 2012	672.031.304	672.031.304	100,00%
Total piutang	**1.388.004.064**	**1.327.180.156**	**104,58%**

b) Piutang Jasa Pelayanan BLUD

Saldo Piutang Klaim Asuransi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.28.612.520.608,00, mengalami kenaikan yang cukup

signifikan yaitu sebesar Rp.1.124.665.552,00 atau naik 4,09% dari saldo Piutang Klaim Asuransi Tahun 2018.

Piutang tersebut merupakan piutang kepada pengelola asuransi kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pelunasannya oleh RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, terdiri dari :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	%
	(Rp)	(Rp)	
Piutang kepada BPJS Kesehatan	28.481.130.194	27.305.760.077,00	104,30%
Piutang kepada Yakes Telkom	14.582.300	14.156.806,00	103,01%
Piutang kepada Pemkab. Pemalang	-	3.952.000,00	0,00%
Piutang kepada Jasa Raharja	43.810.543	105.241.391,00	41,63%
Piutang kepada InHealth	3.480.201	2.846.869,00	122,25%
Piutang kepada BPJS Ketenagakerjaan	23.792.498	20.792.387,00	114,43%
Piutang TB-MDR	34.418.068	10.975.000,00	313,60%
Piutang PT.KAI Persero	565.480	15.730.830,00	3,59%
Piutang Jamkesda Banjarnegara	10.741.324	8.399.696,00	127,88%
	28.612.520.608	**27.487.855.056,00**	104,09%

c) Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp.63.248.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp.34.500.000,00 atau naik 120,01% dari saldo Piutang Tahun 2018.

Piutang tersebut merupakan piutang kerjasama baik dengan Institusi Pendidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Mahasiswa maupun sewa menyewa dengan pihak luar Rumah Sakit sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-19 (Rp)	31-Dec-18 (Rp)	%
Piutang Pendapatan Diklat	12.248.000,00	10.748.000,00	113,96%
Piutang Pendapatan Sewa Lapak PKL	51.000.000,00	-	100,00%
Piutang Pendapatan Sewa Koperasi	-	6.000.000,00	0,00%
Piutang Pendapatan Parkir	-	12.000.000,00	0,00%
Jumlah	**63.248.000,00**	**28.748.000,00**	**220,01%**

Secara lengkap, rincian Piutang dapat dilihat pada Lampiran IV Daftar Rincian Piutang Per 31 Desember 2019.

d. Beban Dibayar Dimuka_____Rp.48.257.639,00

Jumlah Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp.48.257.639,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.920.526,00 atau turun 7,51% dari saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 yang terdiri dari :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.585.639,00	2.083.165,00	(497.526,00)	-23,88%
Beban Premi Asuransi Tanggung Gugat	46.672.000,00	50.095.000,00	(3.423.000,00)	-6,83%
Jumlah	**48.257.639,00**	**52.178.165,00**	**(3.920.526,00)**	**-7,51%**

Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah merupakan biaya premi asuransi kendaraan dinas yang dibayarkan kepada PT.Asuransi Bumiputera Muda pada Triwulan pertama tahun 2019 dan masa aktif jatuh tempo asuransi adalah selama setahun hingga Triwulan pertama tahun 2020.

Sedangkan Premi Asuransi Tanggung Gugat merupakan biaya premi asuransi Tanggung Gugat Dokter yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Bumiputera Muda pada Triwulan kedua tahun 2019 dan masa aktif jatuh tempo asuransi adalah selama setahun hingga Triwulan kedua tahun 2020.

Secara rinci Beban Dibayar Di Muka dapat dilihat pada lampiran VI Rincian Beban Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2019.

e.

ersediaan_____Rp.5.067.212.839,00

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.067.212.839,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.814.988.873,00 atau turun 55,81% dari saldo persediaan per 31 Desember 2018, yang terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlengkapan Rumah Tangga, Barang Cetakan, Bahan Baku Bangunan, Bahan Obat-obatan, Bahan Pelayanan Kesehatan, Perlengkapan Kantor, Makanan dan Minuman Pegawai, Bahan Laboratorium, Makanan dan Minuman Pasien sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	58.383.290,00	116.771.728,00	(58.388.438,00)	-50,00%
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.561.042,00	13.933.705,00	(372.663,00)	-2,67%
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.819.129,00	28.132.337,00	(13.313.208,00)	-47,32%
Persediaan Perlengkapan Rumah Tangga	680.000,00	95.000,00	585.000,00	615,79%
Persediaan Barang Cetakan	31.419.464,00	30.913.743,00	505.721,00	1,64%
Persediaan Bahan baku bangunan	3.395.300,00	5.901.100,00	(2.505.800,00)	-42,46%
Persediaan Bahan obat-obatan	2.827.472.667,00	1.491.789.093,00	1.335.683.574,00	89,54%
Persediaan Bahan Pelayanan Kesehatan	1.402.144.952,00	1.097.622.907,00	304.522.045,00	27,74%
Persediaan Perlengkapan Kantor	910.000,00	2.940.000,00	(2.030.000,00)	-69,05%
Persediaan Makanan dan Minuman Pegawai	1.455.000,00	2.696.550,00	(1.241.550,00)	-46,04%
Persediaan Bahan Laboratorium	678.660.900,00	436.386.989,00	242.273.911,00	55,52%
Persediaan Makanan dan Minuman Pasien	34.311.095,00	25.040.814,00	9.270.281,00	37,02%
JUMLAH	**5.067.212.839,00**	**3.252.223.966,00**	**1.814.988.873,00**	**55,81%**

Saldo Persediaan terbesar berupa Persediaan Bahan Obat-obatan

yaitu Rp.2.827.472.667,00 atau mencapai 55,80% dari total Persediaan tahun 2019.

Persediaan Bahan Obat-obatan juga merupakan persediaan yang mengalami kenaikan terbesar yaitu bertambah 89,54% atau sebesar Rp.1.335.683.574,00 dari semula Rp.1.491.789.093,00 per 31 Desember 2018 menjadi Rp.2.827.472.667,00 per 31 Desember 2019.

Sedangkan saldo Persediaan Alat Tulis Kantor merupakan persediaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu berkurang Rp.58.388.438,00 dari semula Rp.116.771.728,00 per 31 Desember 2018 menjadi Rp.58.383.290,00 per 31 Desember 2019.

Secara lengkap, rincian Persediaan berdasarkan jenis dapat dilihat pada Lampiran III Berita Acara Stock Opname dan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2019.

2. Aset Tetap_____Rp.89.826.930.904,73

Nilai Aset Tetap RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga per 31 Desember 2019 sebesar Rp.89.826.930.904,73 bertambah Rp.10.153.198.190,45 atau naik 12,74% dari posisi per 31 Desember 2018.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Tanah	7.340.020.000,00	7.340.020.000,00	0,00	0,00%
Peralatan dan Mesin	75.052.944.559,00	71.548.897.320,00	3.504.047.239,00	4,90%
Gedung dan Bangunan	61.439.473.172,00	46.757.135.544,00	14.682.337.628,00	31,40%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.441.139.305,00	5.996.202.575,00	2.444.936.730,00	40,77%
Aset Tetap Lainnya	103.485.090,00	103.485.090,00	0,00	0,00%
Akumulasi Penyusutan	-62.550.131.221,27	-52.072.007.814,72	-10.478.123.406,55	20,12%
Jumlah Aset Tetap	**89.826.930.904,73**	**79.673.732.714,28**	**10.153.198.190,45**	**12,74%**

Mutasi bersih aset tetap tahun 2019 senilai Rp.20.631.321.597,00 yang terdiri dari penambahan senilai Rp.21.791.872.265,00 dan pengurangan senilai Rp.1.160.550.668,00.

Penambahan aset tetap tersebut terjadi karena:

(1) Penambahan dari belanja modal APBD berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.1.055.416.516,00 Bangunan Kesehatan sebesar Rp.11.993.779.322,00 dan Instalasi sebesar Rp.2.046.014.730,00
(2) Penambahan dari belanja modal BLUD berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.521.527.036,00 Gedung dan Bangunan sebesar 2.258.295.826,00 serta Instalasi sebesar Rp.398.922.000,00
(3) Penambahan dari non belanja modal BLUD berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.21.914.833,00 dan pemeliharaan Bangunan dan Gedung sejumlah Rp.496.002.000,00
(4) Penambahan dari inventarisasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.2,00

Sedangkan penurunan aset tetap terjadi karena:

(1) Koreksi atas pengelompokan aset tetap (Kebijakan Akutansi Daerah) sebesar Rp.60.067.331,00
(2) Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp.1.100.483.337,00

Secara rinci, penjelasan atas mutasi tambah dan kurang aset tetap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. **Tanah_____Rp.7.340.020.000,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 tetap atau tidak mengalami perubahan dari posisi saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.7.340.020.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Tanah	7.340.020.000,00	7.340.020.000,00	0,00	0,00%
Jumlah	7.340.020.000,00	7.340.020.000,00	0,00	0,00%

b. **Peralatan dan Mesin_____Rp.75.052.944.559,00**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp.75.052.944.559,00 atau terdapat mutasi bertambah sebesar Rp.3.504.047.239,00 atau 4,90% dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.71.548.897.320,00.

Rincian Peralatan dan Mesin dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Alat-alat Besar	2.562.172.330,00	915.022.330,00	1.647.150.000,00	180,01%
Alat-alat Angkut	1.723.408.584,00	1.709.196.584,00	14.212.000,00	0,83%
Alat-alat Bengkel	91.433.172,00	76.785.000,00	14.648.172,00	19,08%
Alat-alat Pertanian	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00%
Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.111.678.567,00	12.798.941.246,00	1.312.737.321,00	10,26%
Alat Studio dan Komunikasi	236.406.225,00	221.944.625,00	14.461.600,00	6,52%
Alat Kedokteran	54.401.560.988,00	53.874.012.840,00	527.548.148,00	0,98%
Alat Laboratorium	1.913.284.693,00	1.939.994.695,00	(26.710.002,00)	-1,38%
Jumlah	**75.052.944.559,00**	**71.548.897.320,00**	**3.504.047.239,00**	**4,90%**

Mutasi bersih tersebut berasal dari penambahan peralatan dan mesin dari Belanja Modal APBD, Belanja Modal BLUD dan penambahan dari Non Belanja Modal senilai Rp.4.598.858.385,00 dan pengurangan peralatan dan mesin karena Reklas ke Aset Lainnya dan pengelompokkan Ekstra Komptable, senilai Rp.1.094.811.146,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 Rp.4.598.858.385,00

URAIAN	Neraca Awal 2018	Penambahan 2019 (Rp)			Jumlah
	(Rp)	BM APBD	BM BLUD	NBM	(Rp)
Alat-alat Besar	915.022.330,00		1.651.650.000,00		2.566.672.330,00
Alat-alat Angkut	1.709.196.584,00		14.212.000,00		1.723.408.584,00
Alat-alat Bengkel	76.785.000,00		14.648.172,00		91.433.172,00
Alat-alat Pertanian	13.000.000,00				13.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.798.941.246,00	1.055.416.516,00	1.024.433.197,00	15.708.000,00	14.894.498.959,00
Alat Studio dan Komunikasi	221.944.625,00		14.861.600,00		236.806.225,00
Alat Kedokteran	53.874.012.840,00		792.482.069,00	6.206.833,00	54.672.701.742,00
Alat Laboratorium	1.939.994.695,00		9.239.998,00		1.949.234.693,00
Jumlah	**71.548.897.320,00**	**1.055.416.516,00**	**3.521.527.036,00**	**21.914.833,00**	**76.147.755.705,00**

Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 Rp.1.094.811.146,00

URAIAN	Saldo setelah penambahan	Pengurangan (Rp)		Jumlah
	(Rp)	Ekstra Komptable	Reklas ke Aset Lainnya	(Rp)
Alat-alat Besar	2.566.672.330,00		4.500.000,00	2.562.172.330,00
Alat-alat Angkut	1.723.408.584,00			1.723.408.584,00
Alat-alat Bengkel	91.433.172,00			91.433.172,00
Alat-alat Pertanian	13.000.000,00			13.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.894.498.959,00	37.001.750,00	745.818.642,00	14.111.678.567,00
Alat Studio dan Komunikasi	236.806.225,00	400.000,00		236.406.225,00
Alat Kedokteran	54.672.701.742,00	22.665.579,00	248.475.175,00	54.401.560.988,00
Alat Laboratorium	1.949.234.693,00		35.950.000,00	1.913.284.693,00
Jumlah	**76.147.755.705,00**	**60.067.329,00**	**1.034.743.817,00**	**75.052.944.559,00**

c. **Gedung dan Bangunan_____Rp.61.439.473.172,00**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.61.439.473.172,00, bertambah sebesar Rp.14.682.337.628,00 atau naik 31,40% dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.46.757.135.544,00.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Gedung dan Bangunan	61.439.473.172,00	46.757.135.544,00	14.682.337.628,00	31,40%
Jumlah	**61.439.473.172,00**	**46.757.135.544,00**	**14.682.337.628,00**	**31,40%**

Mutasi bersih tersebut berasal dari penambahan gedung dan bangunan karena koreksi aset tetap, Belanja Modal baik APBD dan BLUD, serta penambahan dari Non Belanja Modal senilai Rp.14.748.077.150,00 dan pengurangan gedung dan bangunan senilai Rp.65.739.522,00 dari pengelompokkan ekstra Komptable dan Reklas ke Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan gedung dan bangunan Tahun 2019 Rp.14.748.077.150,00

URAIAN	Neraca Awal 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)				Jumlah
		Non BM	BM APBD	BM BLUD	Koreksi Aset	(Rp)
Bangunan Gedung	46.757.135.544,00	496.002.000,00	11.993.779.322,00	2.258.295.826,00	2,00	61.505.212.694,00
Jumlah	**46.757.135.544,00**	**496.002.000,00**	**11.993.779.322,00**	**2.258.295.826,00**	**2,00**	**61.505.212.694,00**

Pengurangan gedung dan bangunan Tahun 2019 Rp.65.739.522,00

URAIAN	Saldo setelah penambahan	Pengurangan (Rp)		Jumlah
	(Rp)	Ekstra Komp.	Reklas ke Aset Lainnya	(Rp)
Bangunan Gedung	61.505.212.694,00	2,00	65.739.520,00	61.439.473.172,00
Jumlah	**61.505.212.694,00**	**2,00**	**65.739.520,00**	**61.439.473.172,00**

d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan_____Rp.8.441.139.305,00**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.8.441.139.305,00 bertambah sebesar Rp.2.444.936.730,00 atau naik 40,77% dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.5.996.202.575,00 seperti terlihat dalam tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Jalan dan Jembatan	393.996.500,00	393.996.500,00	-	0,00%
Instalasi	7.596.243.305,00	5.151.306.575,00	2.444.936.730,00	47,46%
Jaringan	450.899.500,00	450.899.500,00	-	0,00%
Jumlah	**8.441.139.305,00**	**5.996.202.575,00**	**2.444.936.730,00**	**40,77%**

Mutasi bersih tersebut berasal dari penambahan Belanja Modal baik yang berasal dari sumber dana APBD maupun BLUD.

URAIAN	Neraca Awal 2018	Penambahan (Rp)		Jumlah
	(Rp)	BM APBD	BM BLUD	(Rp)
Jalan dan Jembatan	393.996.500,00			393.996.500,00
Instalasi	5.151.306.575,00	2.046.014.730,00	398.922.000,00	7.596.243.305,00
Jaringan	450.899.500,00			450.899.500,00
Jumlah	**5.996.202.575,00**	**2.046.014.730,00**	**398.922.000,00**	**8.441.139.305,00**

e. **Aset Tetap Lainnya_____Rp103.485.090,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.103.485.090,00, atau tetap dan tidak berubah dari posisi per 31 Desember 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Buku dan Kepustakaan	13.735.090,00	13.735.090,00	-	-
Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan	89.750.000,00	89.750.000,00	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya	**103.485.090,00**	**103.485.090,00**	**-**	**-**

Selain nilai aset tetap tersebut di atas, juga terdapat barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel, yaitu barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan, tetapi nilainya di bawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
Saldo daftar barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.60.067.331,00 dan termasuk dalam kategori peralatan dan mesin yaitu :

Alat kantor dan rumah tangga	= Rp.	37.001.750,00
Alat studio dan komunikasi	= Rp.	400.000,00
Alat kedokteran	= Rp.	22.665.579,00
Bangunan dan gedung	= Rp.	2,00 +
	= Rp.	60.067.331,00

3. **Aset Lainnya_____Rp.0,00**

Aset lainnya merupakan saldo aset yang dimiliki oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga selain Aset Lancar dan Aset Tetap.

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00 atau tetap dan tidak berubah dari posisi per 31 Desember 2018.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Aset Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-

Rincian Aset Lainnya disajikan dalam Lampiran XI Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2019.

Selain Aset lain-lain terdapat Obat ED / persediaan obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp.22.979.035,00.

Rincian Daftar Obat ED disajikan dalam Daftar Persediaan Inventarisasi Fisik / Stock Opname Obat dan Alkes Pakai Habis Expired Date Di Gudang Farmasi per 31 Desember 2019. Terlampir di Lampiran III Berita Acara Stock Opname dan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2019.

5.3.2.2 Kewajiban dan Ekuitas Dana_____Rp.131.678.465.629,33

Saldo Kewajiban dan Ekuitas Dana RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.131.678.465.629,33 atau naik sebesar Rp.19.754.459.129,60 (17,65%) dari posisi per 31 Desember 2018.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas tersebut terdiri dari:

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.900.201		76.900.201,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	76.250.000,00	79.861.667,00	-3.611.667,00	-4,52%
Utang Belanja	6.380.031.993,00	7.178.901.029,00	-798.869.036,00	-11,13%
Utang Jangka Pendek Lainnya	67.809.725,00	80.430.500,00	-12.620.775,00	-15,69%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.600.991.919,00	7.339.193.196,00	-738.201.277,00	-10,06%
Jumlah Kewajiban	**6.600.991.919,00**	**7.339.193.196,00**	**-738.201.277,00**	**-10,06%**
Ekuitas	125.077.473.710,33	104.584.813.303,73	20.492.660.406,60	19,59%
Jumlah Ekuitas	**125.077.473.710,33**	**104.584.813.303,73**	**20.492.660.406,60**	**19,59%**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**131.678.465.629,33**	**111.924.006.499,73**	**19.754.459.129,60**	**17,65%**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penurunan terdapat pada jumlah Kewajiban jangka pendek yaitu 10,06% atau turun sebesar Rp.738.201.277,00 sedangkan pada jumlah ekuitas mengalami kenaikan hingga 19,59% atau naik sebesar Rp.20.492.660.406,60 dari posisi per 31 Desember 2018.

5.3.2.2.1 Kewajiban_____Rp.6.600.991.919,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.600.991.919,00, mengalami penurunan sebesar Rp.738.201.277,00 atau turun 10,06% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.7.339.193.196,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.900.201,00		76.900.201,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	76.250.000,00	79.861.667,00	- 3.611.667,00	-4,52%
Utang Belanja	6.380.031.993,00	7.178.901.029,00	- 798.869.036,00	-11,13%
Utang Jangka Pendek Lainnya	67.809.725,00	80.430.500,00	- 12.620.775,00	-15,69%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.600.991.919,00	7.339.193.196,00	- 738.201.277,00	-10,06%
Jumlah Kewajiban	**6.600.991.919,00**	**7.339.193.196,00**	**-738.201.277,00**	**-10,06%**

Secara rinci kewajiban tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)_____Rp.76.900.201,00

Saldo Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 sebesar Rp.76.900.201,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.76.900.201,00 atau naik 100% dari saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.0,00.

Utang PFK ini merupakan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga bulan Desember 2019 yang belum disetorkan ke Bank BRI.

b. Pendapatan diterima dimuka_____Rp.76.250.000,00

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp.76.250.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.611.667,00 atau turun 4,52% dari saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.79.861.667,00.

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa / mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri / Swasta dengan perjanjian / MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit.

Secara rinci pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran XII Rincian Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2019.

c. Utang Belanja_____Rp.6.380.031.993,00

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.380.031.993,00 mengalami penurunan sebesar 11,13% atau turun Rp.798.869.036,00 dari saldo utang belanja per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.7.178.901.029,00.

Saldo utang belanja tersebut terdiri dari utang belanja pegawai (rapel gaji) 2019 sebesar Rp.22.440.304,00 dan utang belanja pegawai (jasa medis) 2019 sebesar Rp.3.622.818.000,00, utang tambahan penghasilan pegawai 2019 sebesar Rp.507.878.500,00 serta utang belanja barang dan jasa berupa belanja obat-obatan sebesar Rp.2.175.805.519,00 belanja alat kesehatan pakai habis sebesar Rp.46.699.890,00 dan belanja laboratorium sebesar Rp.4.389.780,00.
Rincian Utang Belanja 2019 dapat dilihat pada Lampiran XIII Rincian Utang Belanja (Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang Jasa) Per 31 Desember 2019.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya_____Rp.67.809.725,00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.67.809.725,00 mengalami penurunan sebesar 15,69% atau turun Rp.12.620.775,00 dari saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.80.430.500,00.
Saldo tersebut merupakan utang jaminan pemeliharaan pihak ketiga (PFK) dengan rincian sebagai berikut :

Utang Jaminan Pemeliharaan 2018	Rp. 80.430.500,00
Pengambilan Utang Jaminan 2019	(Rp. 61.918.000,00)
Penambahan Utang Jaminan 2019	Rp. 49.297.225,00
Utang Jaminan Pemeliharaan 2019	**Rp. 67.809.725,00**

2. Ekuitas_____Rp.125.077.473.710,33

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.125.077.473.710,33 mengalami kenaikan sebesar Rp.20.492.660.406,60 atau naik 19,59%

dari saldo ekuitas per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.104.584.813.303,73 seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Ekuitas	125.077.473.710,33	104.584.813.303,73	20.492.660.406,60	19,59%
Jumlah Ekuitas	**125.077.473.710,33**	**104.584.813.303,73**	**20.492.660.406,60**	**19,59%**

Ekuitas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp. 104.584.813.303,73
Defisit LO	(Rp. 27.552.424.526,24)
Koreksi Mutasi Aset Tetap	(Rp. 355.126.988,40)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Utang	Rp. 357.168.151,00
Koreksi Saldo Awal	Rp. 294.254,24
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp. 48.042.749.516,00
Ekuitas Akhir	**Rp.125.077.473.710,33**

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak menerapkan penyajian kembali (restatement) terhadap Laporan Operasional tahun 2018 sehingga dalam penjelasan di bawah ini, tidak ada perbandingan antara Laporan Operasional tahun 2019 dengan Laporan Operasional tahun 2018.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional yaitu pendapatan-LO dan beban serta kegiatan non operasional yaitu Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. ***Beban*** adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Pendapatan-LO RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.105.385.142.844,00 atau mencapai 113,32% dari target sebesar Rp.93.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi Beban RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.132.937.567.370,24 atau mencapai 141,38% dari anggaran sebesar Rp.94.025.748.000,00. Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.70.801.848.148,00, Beban Persediaan sebesar Rp.35.742.671.109,00, Beban Jasa sebesar Rp.11.828.007.495,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp.2.970.983.063,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.260.602.330, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.11.223.774.007,39 dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.109.681.217,85.

Dari realisasi Pendapatan dan Beban tersebut, maka pada tahun 2019, terdapat defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.27.552.424.526,24.

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional sebagaimana berikut:

5.4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN – LO_____Rp.105.385.142.844,00

Realisasi Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.105.385.142.844,00 atau mencapai 113,32% dari target sebesar Rp.93.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.

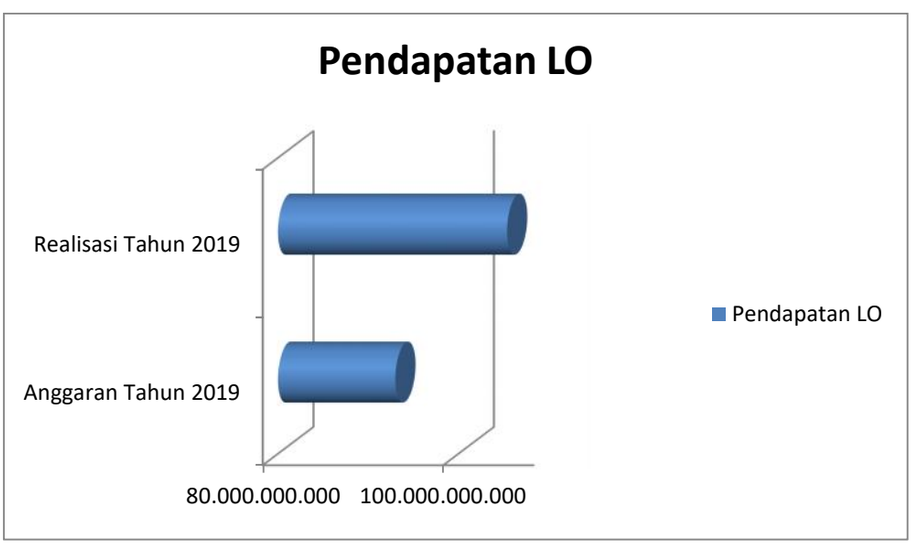

Pendapatan Asli Daerah (PAD)_____Rp.105.385.142.844,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sebesar Rp.105.385.142.844,00 atau naik 8,20% dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp.97.398.975.957,00 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

URAIAN	31-Dec-19	31-Dec-18	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	105.385.142.844,00	97.398.975.957,00	7.986.166.887,00	8,20%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari :

Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan 2019	Rp.	104.161.541.717,00
Pendapatan diterima dimuka 2018	Rp.	79.861.667,00
Penerimaan Piutang 2019	Rp.	28.701.125.850,00
Pelunasan Piutang 2018	(Rp.	27.481.136.390,00)
Pendapatan diterima dimuka 2019	(Rp.	76.250.000,00)
Jumlah Pendapatan LO	**Rp.**	**105.385.142.844,00**

Dilihat dari nilai kontribusinya, Pendapatan dari Jasa Layanan Kesehatan menjadi yang terbesar dengan nilai Rp.104.161.541.717,00 atau 98,84% dari total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.

Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar Rp.79.861.667,00 merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa / mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri / Swasta dengan perjanjian / MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit.

Penerimaan Piutang 2019 sebesar Rp.28.701.125.850,00 berasal dari Piutang Asuransi 2019, Piutang Pasien 2019, Piutang Pendapatan Diklat 2019 dan Piutang Sewa Lapak PKL 2019 sebagaimana rincian berikut :

Piutang Asuransi 2019	Rp.	28.585.280.776,00
Piutang Pasien 2019	Rp.	63.345.074,00

Piutang Diklat 2019	Rp. 1.500.000,00
Piutang Sewa Lapak PKL 2019	Rp. 51.000.000,00
Penerimaan Piutang 2019	**Rp. 28.701.125.850,00**

Pelunasan Piutang 2018 sebesar Rp.27.481.136.390,00 berasal dari Pelunasan piutang Asuransi tahun 2018 sebesar Rp.27.460.615.224,00, pelunasan sewa koperasi tahun 2018 sebesar Rp.6.000.000,00, pelunasan pendapatan parkir tahun 2018 sebesar Rp.12.000.000,00 dan pelunasan piutang pasien tahun 2018 sebesar Rp.2.521.166,00.

Pendapatan diterima dimuka 2019 sebesar Rp.76.250.000,00 merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa / mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri / Swasta dengan perjanjian / MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit.

B. BEBAN Rp.132.937.567.370,24

Beban RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2019 sebesar Rp.132.937.567.370,24 atau naik 2,66% dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp.3.442.180.732,70. Realisasi Beban tersebut terdiri dari dari Beban Pegawai sebesar Rp.70.801.848.148,00 (53,26%), Beban Persediaan sebesar Rp.35.742.671.109,00 (26,89%), Beban Jasa sebesar Rp.11.828.007.495,00 (8,90%), Beban Pemeliharaan sebesar Rp.2.970.983.063,00 (2,23%), Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.260.602.330 (0,20%), Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.11.223.774.007,39 (8,44%) dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.109.681.217,85 (0,08%).

1. Beban Pegawai Rp.70.801.848.148,00

Beban Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Beban Pegawai tahun 2019 sebesar Rp.70.801.848.148,00, terdiri dari :

URAIAN	Belanja Pegawai LRA 2019	Penyesuaian Utang Belanja Tahun 2018	Penyesuaian Utang Belanja Tahun 2019	Beban Pegawai LO 2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5 = 2-3+4
BELANJA APBD				
BELANJA TAK LANGSUNG	**25.447.879.440,00**	**14.988.582,00**	**22.440.304,00**	**25.455.331.162,00**
Gaji Pokok PNS	19.499.078.352,00	5.536.800,00	3.341.200,00	19.496.882.752,00
Tunjangan Keluarga	1.816.127.866,00	661.580,00	345.892,00	1.815.812.178,00
Tunjangan Jabatan	127.900.000,00			127.900.000,00
Tunjangan Fungsional	1.847.455.000,00	8.550.000,00	18.610.000,00	1.857.515.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	360.275.000,00			360.275.000,00
Tunjangan Beras	1.028.001.900,00			1.028.001.900,00
Tunjangan PPh / Khusus	59.361.120,00			59.361.120,00
Pembulatan Gaji	300.806,00		515,00	301.321,00
Iuran Asuransi Kesehatan	548.912.815,00	185.975,00	110.606,00	548.837.446,00
Iuran Jaminan Kematian	120.348.550,00	39.862,00	24.061,00	120.332.749,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	40.118.031,00	14.365,00	8.030,00	40.111.696,00
BELANJA BLUD			-	-
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD			-	-
PENYEDIAAN BAHAN DAN JASA PERKANTORAN	**45.005.269.486,00**	**3.876.399.000,00**	**4.130.696.500,00**	**45.259.566.986,00**
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.612.500,00			79.612.500,00
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	21.700.000,00			21.700.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	23.650.000,00			23.650.000,00
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	291.933.000,00			291.933.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	62.000.000,00			62.000.000,00
Uang Lembur PNS	106.123.500,00			106.123.500,00
Uang Lembur Non PNS	59.812.500,00			59.812.500,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.445.022.650,00	492.098.000,00	497.928.500,00	6.450.853.150,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	115.950.000,00	8.800.000,00	9.950.000,00	117.100.000,00
Belanja Jasa Medis	37.799.465.336,00	3.375.501.000,00	3.622.818.000,00	38.046.782.336,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI	**9.950.000,00**	**-**	**-**	**9.950.000,00**
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00			2.100.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS)	7.850.000,00			7.850.000,00
AKREDITASI	**77.000.000,00**	**-**	**-**	**77.000.000,00**
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.200.000,00			66.200.000,00
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	10.800.000,00			10.800.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	**70.540.098.926**	**3.891.387.582**	**4.153.136.804**	**70.801.848.148**

Perbedaan nilai realisasi Belanja Pegawai–LRA sebesar Rp.70.540.098.926,00 dan Beban Pegawai–LO sebesar Rp.70.801.848.148,00 terjadi karena terdapat Utang Belanja Pegawai tahun 2018 yang dibayarkan di tahun 2019 yaitu sebesar Rp.14.988.582,00 (Rapel Gaji) dan Rp.3.375.501.000,00 (Belanja Jasa Medis) juga Rp.500.898.000,00 (Tambahan Penghasilan Pegawai) serta Utang Belanja Pegawai tahun 2019 yang dibayarkan di tahun 2020 sebesar Rp.22.440.304,00 (Rapel Gaji) dan Rp.3.622.818.000,00 (Jasa Medis) serta Rp.507.878.500,00 (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebagaimana rincian sebagai berikut :

Utang Belanja Pegawai 2019 (Rapel Gaji)	Rp. 22.440.304,00
Utang Belanja Pegawai 2019 (Jasa Medis)	Rp. 3.622.818.000,00
Utang Belanja Pegawai 2019 (Tamsil Peg.)	Rp. 507.878.500,00
Belanja Pegawai LRA 2019	Rp. 70.540.098.926,00
Utang Belanja Pegawai 2018 (Rapel Gaji)	(Rp. 14.988.582,00)
Utang Belanja Pegawai 2018 (Tamsil Peg.)	(Rp. 500.898.000,00)
Utang Belanja Pegawai 2018 (Jasa Medis)	(Rp. 3.375.501.000,00)
Beban Pegawai LO 2018	**Rp. 70.801.848.148,00**

2. Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2019 sebesar Rp.35.742.671.109,00, terdiri dari :

Persediaan LRA 2019	Rp. 38.201.042.758,00
Beban Persediaan 2019	(Rp. 5.067.212.839,00)
Beban Persediaan 2018	Rp. 3.252.223.966,00

Utang Beban Persediaan 2019	Rp.	2.226.895.189,00
Utang Beban Persediaan 2018	(Rp.	2.930.345.296,00)
Beban Ekstrakom 2019	Rp.	60.067.331,00
Jumlah Beban Persediaan	**Rp.**	**35.742.671.109,00**

3. Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun 2019 sebesar Rp.11.828.007.495,00, terdiri dari :

Belanja Jasa LRA 2019	Rp.	11.824.086.969,00
Utang Beban Jasa Premi Asuransi 2018	Rp.	52.178.165,00
Utang Beban Jasa Premi Asuransi 2019	(Rp.	48.257.639,00)
Jumlah Beban Jasa	**Rp.**	**11.828.007.495,00**

4. Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Jasa tahun 2019 sebesar Rp.2.970.983.063,00, terdiri dari :

Belanja Pemeliharaan LRA 2019	Rp.	3.488.899.896,00
Belanja Pemeliharaan yang menjadi Aset 2019	(Rp.	517.916.833,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan	**Rp.**	**2.970.983.063,00**

5. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 sebesar Rp.260.602.330,00 merupakan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019 yang terdiri dari :

Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	19.505.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.	241.097.330,00
Jumlah	**Rp.**	**260.602.330,00**

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi_____Rp.11.223.774.007,39

Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019 sebesar Rp.11.223.774.007,39, terdiri dari beban penyusutan aset tetap seperti pada tabel berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2019
	BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	42.228.700,00
2	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	267.485.666,25
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	85.337.500,00
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.099.746,00
5	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	100.000,00
6	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	9.930.234,40
7	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.250.000,00
8	Beban Penyusutan Alat Kantor	269.386.924,20
9	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	1.383.895.005,00
10	Beban Penyusutan Komputer	163.079.875,00
11	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.565.694,20
12	Beban Penyusutan Alat Studio	1.615.520,00
13	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	2.864.400,00
14	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	2.000.000,00
15	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	7.061.647.196,80
16	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	68.067.278,60
17	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	170.270.711,61
18	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	200.000,00
	BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
19	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.212.536.312,12
20	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.649.233,60
21	Beban Penyusutan Bangunan Menara	1.827.207,20
22	Beban Penyusutan Sarana Pelengkap	7.388.000,00
	BEBAN PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
23	Beban Penyusutan Jalan	39.399.650,00
	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Bersih	7.355.557,67
24	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	4.333.333,34
25	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	225.265.200,00
26	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	45.618.728,75
27	Beban Penyusutan Instalasi Gas	104.346.349,32
28	Beban Penyusutan Jaringan Gas	15.029.983,33
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	**11.223.774.007,39**

7. Beban Penyisihan Piutang_____Rp.109.681.217,85

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 adalah sebesar Rp.109.681.217,85 merupakan penyisihan Piutang Pasien sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Umur Piutang > 1-2 tahun = Piutang Tahun 2018 sebesar Rp.81.063.405,00

Umur Piutang > 2-3 tahun = Piutang Tahun 2017 sebesar Rp.104.692.714,00

Umur Piutang > 3-4 tahun = Piutang pasien Tahun 2016 sebesar Rp.195.241.893,00

Umur Piutang > 4-5 tahun = Piutang pasien Tahun 2015 sebesar Rp.89.621.661,00

Umur Piutang > 5 tahun = Piutang pasien < Tahun 2015 sebesar Rp.892.027.149,00

a. Perhitungan penyisihan piutang 2019:

>1-2 tahun = 25% x Rp. 81.063.405,00	= Rp.	20.265.851,25
>2-3 tahun = 35% x Rp. 104.692.714,00	= Rp.	36.642.449,90
>3-4 tahun = 50% x Rp. 195.241.893,00	= Rp.	97.620.946,50
>4-5 tahun = 75% x Rp. 89.621.661,00	= Rp.	67.216.245,75
>5 tahun = 100% x Rp.892.027.149,00	= Rp.	892.027.149,00 +
Penyisihan Piutang 2019	**= Rp.1.113.772.642,40**	
b. Penyisihan Piutang 2018	=(**Rp. 1.004.091.424,55)**	
Jumlah Beban Penyisihan Piutang 2019	= **Rp. 109.681.217,85**	

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang terdapat pada Lampiran V Tabel Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2019.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas BLUD selama periode tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi yang terjadi pada Rekening Kas yang dikelola oleh BLUD.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara BLUD (Arus kas masuk)

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara BLUD (Arus kas keluar)

5.5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1. Penerimaan Kas (Arus Kas Masuk)
Lain-lain PAD yang Sah_____Rp.104.161.541.717,00

Saldo Penerimaan Kas (Arus kas masuk) per 31 Desember 2019 sebesar Rp.104.161.541.717,00 mengalami peningkatan sebesar 17,74% atau naik Rp.15.694.015.829,00 dari saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.88.467.525.888,00.
Saldo ini merupakan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pendapatan BLUD) yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp.102.216.210.529,00, Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD sebesar Rp.527.321.911,00 dan Pendapatan Lain-lain BLUD sebesar Rp.1.418.009.277,00 sebagaimana dirinci dan dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran – Pendapatan dan dapat diringkas seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
		(Rp)	(Rp)
	Pendapatan BLUD	**104.161.541.717,00**	**88.467.525.888,00**
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	102.216.210.529,00	87.267.195.942,00
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	527.321.911,00	583.128.334,00
3	Pendapatan Lain-lain	1.418.009.277,00	617.201.612,00

2. Pengeluaran Kas (Arus Kas Keluar)_____Rp.91.367.191.931,00

Saldo Pengeluaran Kas (Arus kas keluar) per 31 Desember 2019 sebesar Rp.91.367.191.931,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.087.534.833,00 atau naik 8,41% dari posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.84.279.657.098,00.

Arus kas keluar ini terdiri dari :

a) Belanja Pegawai_____Rp.45.092.219.486,00

Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 sejumlah Rp.45.092.219.486,00 mengalami penurunan sebesar 0,16% atau turun Rp.72.997.590,00 dari posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp.45.165.217.076,00.

Realisasi ini merupakan Belanja Pegawai BLUD tahun 2019 sebagaimana telah dirinci dan dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran – Belanja Pegawai dan dapat dirinci seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
		(Rp)	(Rp)
	Belanja Pegawai	**45.092.219.486**	**45.165.217.076**
1	Honorarium	565.845.500	640.830.500
2	Uang Lembur	165.936.000	141.489.500
3	Tambahan Penghasilan	6.560.972.650	6.852.716.200
4	Jasa Medis	37.799.465.336	37.530.180.876

b) Belanja Barang dan Jasa_____Rp.46.274.972.445,00

Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sejumlah Rp.46.274.972.445,00 mengalami kenaikan sebesar 18,31% atau naik Rp.7.160.532.423,00 dari posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp.39.114.440.022,00.

Realisasi ini merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2019 sebagaimana telah dirinci dan dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran – Belanja Barang dan Jasa dan dapat dirinci seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
		(Rp)	(Rp)
1	Bahan Pakai Habis	1.496.086.555	1.290.727.463
2	Bahan Material	25.217.141.238	18.376.635.033
3	Jasa Kantor	10.945.466.026	10.298.420.130
4	Premi Asuransi	101.289.645	110.928.525
5	Perawatan Kendaraan Bermotor	117.834.125	155.503.645
6	Cetak dan Penggandaan	698.410.150	590.691.765
7	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.442.532	75.138.262
8	Makanan dan Minuman	3.269.372.932	3.176.741.511
9	Pakaian Dinas dan Atributnya	1.025.000	2.819.000
10	Pakaian Kerja	19.347.375	77.197.500
11	Perjalanan Dinas	260.602.330	247.586.625
12	Pemeliharaan	3.371.065.771	3.741.989.233
13	Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000	18.000.000
14	Kursus, Pelatihan	710.888.766	952.061.330
	Jumlah	**46.274.972.445**	**39.114.440.022**

3. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi_Rp.12.794.349.786,00

Saldo Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 sebesar 12.794.349.786,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.606.480.996,00 atau naik sebesar 205,51% dari saldo per 31 Desember 2018 yaitu sejumlah Rp. 4.187.868.790,00.

Saldo ini merupakan pengurangan dari Saldo Arus kas masuk dengan Saldo Arus kas keluar tahun 2019.

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1	Arus Kas Masuk	104.161.541.717	88.467.525.888
2	Arus Kas Keluar	91.367.191.931	84.279.657.098
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**12.794.349.786**	**4.187.868.790**

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

1. Arus Kas Masuk_____Rp.0,00

Tidak ada Saldo Arus kas masuk dari aktivitas investasi per 31 Desember 2019 sama seperti Saldo per 31 Desember 2018.

2. Arus Kas Keluar_____Rp.6.178.744.862,00

Saldo Arus kas keluar per 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.178.744.862,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.711.237.037,00 atau naik 78,19% dari posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.3.467.507.825,00.

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas Keluar		
1	BM Peralatan dan Mesin	1.492.839.496	3.467.507.825
2	BM Gedung dan Bangunan	4.247.255.366	-
3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	438.650.000	-
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	**6.178.744.862**	**3.467.507.825**

C. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, penyetoran kas di bendahara penerimaan, serta kiriman uang.
Termasuk ke dalam kategori Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah arus kas yang terkait dengan transaksi PFK pada Bendahara BLUD.

1. Arus Kas Masuk_____Rp.126.197.426,00

Saldo Arus kas masuk per 31 Desember 2019 sebesar Rp.126.197.426,00 mengalami penurunan sebesar Rp.259.621.476,00 atau turun 67,29% dari posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.385.818.902,00.

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan PFK	76.900.201	-
2	Penerimaan Retensi BLUD	49.297.225	80.430.500
3	Koreksi SILPA Tahun sebelumnya	-	305.388.402
	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	**126.197.426**	**385.818.902**

2. Arus Kas Keluar_____Rp.61.918.000,00

Saldo Arus kas keluar per 31 Desember 2019 sebesar Rp.61.918.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.61.918.000,00 atau naik 100,00% dari posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.0,00.

Saldo ini merupakan Pengambilan Retensi BLUD tahun 2019 sebesar Rp. 61.918.000,00.

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal_____Rp.104.584.813.303,73

Ekuitas awal tahun 2019 berasal dari saldo ekuitas akhir tahun 2018 sebesar Rp.104.584.813.303,73

B. Defisit-LO_____(Rp.27.552.424.526,24)

Defisit – LO tahun 2019 berasal dari realisasi Pendapatan LO 2019 sebesar Rp.105.385.142.844,00 dikurangi realisasi Beban 2019 sebesar Rp.132.937.567.370,24 sehingga terdapat Defisit LO sebesar Rp.27.552.424.526,24.

C. Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap_____(Rp.355.126.988,40)

Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap tahun 2019 sebesar Rp.355.126.988,40 berasal dari penambahan dan pengurangan ekuitas

No.	Uraian	Pengurangan	Penambahan
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Alat Kantor Lainnya)	297.276.212,80	
2	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Bangunan Menara)	57.850.777,60	
3	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Bangunan Gedung tempat Olahraga)		1,00
4	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Rumah Negara Golongan III)		1,00
	Jumlah	**355.126.990,40**	**2,00**
	Pengurangan Ekuitas	**355.126.988,40**	

akibat mutasi aset tetap sebagaimana rincian pada tabel berikut :

D. Koreksi Ekuitas karena Kesalahan Pencatatan Utang (Rp.357.168.151,00)

Koreksi Ekuitas karena kesalahan pencatatan Utang tahun 2019 sebesar Rp.357.168.151,00 berasal dari :

1. Koreksi utang belanja pegawai (rapel gaji) tahun 2018 dimana realisasi pembayaran utang di tahun 2019 lebih kecil dari saldo utang yang disajikan di tahun 2018 sebesar Rp.132.840,00

2. Koreksi utang belanja barang dan jasa (Obat) tahun 2018 dimana realisasi pembayaran utang di tahun 2019 lebih besar dari saldo utang yang disajikan di tahun 2018 sebesar Rp.357.035.311,00

Atau dapat disajikan dalam tabel berikut :

No.	Uraian	(Rp)
1	Koreksi Ekuitas karena Kesalahan Pencatatan Utang (Utang Rapel Gaji 2018)	132.840,00
2	Koreksi Ekuitas karena Kesalahan Pencatatan Utang (Utang Obat 2018)	357.035.311,00
	Jumlah	357.168.151,00

E. Koreksi Ekuitas karena Koreksi Saldo Awal_____Rp.294.254,24

Saldo koreksi Saldo Awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp.294.254,24 mengalami peningkatan sebesar 100,00% atau naik Rp.295.254,24 dari saldo per 31 Desember 2018 dikarenakan tahun 2018 tidak ada koreksi ekuitas karena koreksi Saldo Awal.

F. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan_____Rp.48.042.749.516,00

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.48.042.749.516,00 mengalami peningkatan sebesar 34,41% atau naik Rp.12.300.032.776,00 dari saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.35.742.716.740,00.
Saldo tersebut merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan R/K SKPD.

G. Ekuitas Akhir_____Rp.125.077.473.710,33

Ekuitas akhir tahun 2019 berasal dari saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp.104.584.813.303,73 dikurangi dengan defisit LO tahun 2019 sebesar Rp.27.552.424.526,24 dikurangi dengan koreksi ekuitas karena mutasi aset tetap sebesar Rp.355.126.988,40 ditambah koreksi ekuitas karena kesalahan pencatatan utang sebesar Rp.357.168.151,00 ditambah dengan koreksi ekuitas karena koreksi Saldo Awal sejumlah Rp.294.254,24 dan ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2019 sebesar Rp.48.042.749.516,00 sehingga ekuitas akhir adalah Rp.125.077.473.710,33.

BAB VI

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan belanja RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga berbanding lurus, jika pendapatan naik maka belanja pun mengalami kenaikan. Dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2019 secara keseluruhan RSUD dapat melaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat dilihat dari selisih antara anggaran dan realisasi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun Anggaran 2019 telah disajikan secara sistematis agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya serta dalam mengambil satu kebijakan untuk RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Direktur RSUD
dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

dr. NONOT MULYONO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620909 198803 1 011